



RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI DENGAN PAKAR PENDIDIKAN

- Tahun Sidang : 2023 - 2024
Masa Persidangan : V (lima)
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Pakar Pendidikan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat : DR. Dede Yusuf ME., S.T.M.I.POL.
Sekretaris Rapat : Dadang Pratina, S.IP., M.H
Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI
- Acara : 1. Pandangan dan Masukan mengenai Implementasi Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan 20% APBN (2019-2024) untuk Pembiayaan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi.
2. Pandangan dan Evaluasi Implementasi Pembiayaan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi (al. UKT, BOS PAUD, BOS, PIP, KIP, BOPTN lain-lain).
- Hadir : **PIMPINAN :**
1. Dr. Dede Yusuf ME., S.T.M.I.Pol.
2. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
- ANGGOTA :**
F-PDI PERJUANGAN :
1. Putra Nababan
- F-P.GOLKAR :**
1. Ferdiansyah, S.E., M.M.
- F-P.GERINDRA:**
1. Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin
- F-P.NASDEM :**
1. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.MTr.
- F-PKB :**
1. Dr. H. Muhammad Kadafi., S.H., M.H.
- F-P.DEMOKRAT :**
1. -

F-PKS :

1. Hj. Ledia Hanifa A, S.Si.,M.Psi.T.
2. Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M., Med.

F-PAN :

1. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.
2. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.

F-PPP :

1. –

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.

UNDANGAN :

1. Rektor Universitas Paramadina (Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D.)
2. Guru Besar Pembiayaan Pendidikan UPI (Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M.Pd)
3. Rektor Universitas YARSI (Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.)

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Alhamdulillah,

Hari ini, pagi hari ini, kita bisa melaksanakan Panja Pembiayaan Pendidikan bersama dengan narasumber kita, pakar-pakar di bidang pendidikan yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri dan juga berhubungan dengan dunia pendidikan dan Komisi X sudah lama.

Jadi, yang kami hormati ini, Prof. dr. Fasli Jalal,

Beliau saat ini adalah Rektor Universitas Yarsi, tapi beliau juga dulu adalah mantan Sekjen dan mantan Wamen Pendidikan. *Oh sorry,* mantan Dirjen Dikti dan mantan Wakil Menteri Pendidikan. Kita semua bertanya-tanya Pak, kenapa sekarang *nggak* ada Wamen gitu. Padahal *slot*-nya ada dua Wamen, sebetulnya itu ya.

Dan sudah hadir juga di sini, pembicara ataupun narasumber kita yang kedua, ini adalah Profesor Didik J. Rachbini. Ini beliau sudah sangat terkenal sekali. Uniknya, beliau saat ini adalah Rektor Universitas Paramadina, meneruskan Anis Baswedan dan uniknya beliau adalah mantan Pimpinan Komisi X, artinya.

REKTOR UNIVERSITAS PARAMADINA, (PROF. DIDIK J. RACHBINI, M.SC., PH.D.):

2004 ada disini, 2004-2009.

KETUA RAPAT:

2004-2009, artinya cumin beda, pindah tempat duduk. Dulu di sini, sekarang di sana.

Kemudian yang paling sebelah kiri dari saya adalah Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M. Pd., Guru Besar Pembiayaan Pendidikan UPI, Universitas Pendidikan Islam, ya Pak ya benar? Oh iya Indonesia ya? UPI dulu IKIP. Ini yang di, yang di Bandung? Petilasan IKIP.

GURU BESAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UPI, (PROF. DR. H. NANANG FATTAH, M. PD.):

Betul.

KETUA RAPAT:

Ini Bandung ya Pak? Iya di Bandung. Soalnya namanya sudah Nanang Fatah pasti orang Bandung, Teh Lidia.

Pertama-tama, izinkan saya membuka rapat ini dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrahiim, bismillah*.

(RAPAT: SETUJU)

**Pimpinan dan anggota Komisi X yang hadir hari ini,
Ada Pak Fikri, selaku Pimpinan Komisi X,**

Lalu kemudian ada anggota yang baru datang, Prof. Johar Arifin. Beliau masih pakai Prof, karena masih ngajar di Malaysian University ya Pak ya? Medan juga. Beliau ini profesor juga.

Lalu kemudian ada, yang profesor-profesor saya sebut ini. Ada Profesor Zainuddin Maliki. Ini beliau Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah ya Pak ya? di Surabaya.

Lalu kemudian ada tokoh pendidikan yang paling ujung belakang. Bapak, Profesor bukan? Fahmi, Dr. Fahmi Alaydroes. Beliau ini punya yayasan apa Pak? Islamic School ya? Nurul Fikri, Nurul Fikri Islamic School.

Lalu kemudian juga dari PKS masih ada teh Lidia yang ini sudah getol sekali soal pendidikan. Lalu ada dari PDIP Putra Nababan. Temannya Prof. Prof yang mana? Dan ada Ibu Lisda, Ibu Lisda Joni dari Sumatera Barat dari Fraksi Nasdem. Saya sendiri, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat.

Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Agenda kita adalah pandangan masukan mengenai Implementasi Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan 20% APBN selama 2019-2024 untuk Pembiayaan Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Tinggi.

Sekilas cerita saja, awalnya waktu UKT naik, kami langsung merespon dengan kita harus selidiki masalah UKT mahal. Kenapa pendidikan itu mahal terutama pas masuk perguruan tinggi. Tapi kemudian kawan-kawan juga mengatakan kita belum pernah membongkar BOS ya.

Terus kemudian apa, beasiswa, PIP, KIP, termasuk apakah anggaran BOS ini sudah cukup atau belum, sudah memadai atau belum? Karena yang sebagaimana kita temukan di lapangan, walaupun sudah mendapatkan BOS, tapi pembiayaan-pembiayaan tarikan-tarikan itu masih ada saja.

Nah, apakah konsep ini sudah sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar atau belum? Lalu kemudian, di mana intervensi pemerintah? Apakah benar-benar sesuai dengan harapannya Wajar Dikdas 12 tahun atau kita mau mengajar Wajar Dikdas sampai 16 tahun, sampai selesai kuliah?

Lalu kemudian kedua, Pandangan dan Evaluasi Implementasi Pembiayaan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi, tadi sudah saya sampaikan. UKT, BOS, PAUD, BOS, PIP, KIP, BOPTN dan lain-lainnya. Mungkin yang lain nanti berkembang, apakah dapat disetujui?

Iya makasih. Untuk sementara waktunya sampai jam makan siang, 12.30 setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Makasih.

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,

Penyelenggaraan pendidikan sesuai amanat Pasal 35 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20, maaf Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar isi, proses, kompetensi, lulusan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

Dari delapan standar nasional pendidikan tersebut, pembiayaan pendidikan belum mendapat perhatian dalam hal pengawasan kebijakan. Pendanaan pendidikan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas pendidikan di suatu negara, di mana Indonesia telah memiliki *mandatory spending* pendidikan yang amanatkan konstitusi Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan ini sejak tahun 2009. Alokasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja publik untuk pendidikan terbesar di Asia.

Namun Bapak dan Ibu sekalian,

Sebagaimana kita pahami bahwa walaupun *spending* pendidikan terbesar di Asia pada realitanya, kenyataan pendidikan masih belum bergerak terlalu banyak. APK kita, maaf angka lama sekolah kita masih berada di bawah 9 tahun. APK kita masih hanya sekitar 33, APK kuliah 33% dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan pendidikan.

Total anggaran pendidikan yang telah dikururkan oleh pemerintah melalui APBN secara keseluruhan sejak tahun 2009. Total nih ya, dari 2009, mencapai 6.625,8 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya.

Kebijakan pemerintah pada periode tahun 2015 fokus pada pembiayaan yang terlihat dari porsi alokasi pada APBN yang mengalami pertumbuhan setiap tahun. Rata-rata alokasi anggaran pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 575,62 triliun, 2024 adalah 665 triliun dan konon tahun 2025 sudah teralokasi mungkin sekitar 750 triliun.

Nah, dari porsi alokasi anggaran pendidikan yang terus meningkat, belum sepenuhnya menjawab amanat konsideran. Menimbang huruf C Undang-Undang Sisdiknas. Hal ini tercermin dalam angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni sejak tahun 2009 hingga tahun 2023.

Untuk mencapai tujuan tersebut, *mandatory spending* pendidikan telah diterjemahkan pemerintah melalui program-program yang mendukung aksesibilitas seluruh warga negara mendapatkan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Di antaranya melalui program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), KIP Kuliah dan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau BOPTN.

Namun dalam perjalanannya upaya tersebut masih belum menjawab permasalahan aksesibilitas pendidikan di Indonesia dengan kondisi peserta didik lingkungan sekolah dan geografis yang beragam.

Jadi, Bapak-Bapak para narasumber, yang jelas inilah kurang lebih gambaran-gambaran terhadap dunia pendidikan yang perlu kita cari tahu. Apakah 20% anggaran fungsi pendidikan ini sudah tepat sasaran atau belum? Lalu kemudian juga Apakah di negara ini ada yang disebut dengan negeri dan swasta, pengelola pendidikan negeri dan swasta. Apakah dalam masalah pembiayaan pendidikan ini sudah berimbang dan terdistribusi dengan baik atau belum?

Lalu kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kemarin cukup ramai. Ada kurang lebih 22 K/L lainnya yang juga menerima anggaran fungsi pendidikan, yang mana dari hasil presentasi kemarin dari Kemendikbud dan Kemendagri, justru K/L lainnya itu menjalankan fungsi pendidikan kedinasan, namun juga menerima non kedinasan. Artinya prodi-prodi yang sama yang dilakukan di fakultas lain. Sehingga dari situ kita bisa melihat, lalu fungsi non kedinasan ini untuk apa?

Nah, kemudian juga program-program pemerintah terkait pembiayaan pendidikan seringkali melahirkan polemik, seperti UKT yang mahal, IPI (Iuran Pengembangan Institusi) yang juga sangat mahal dan yang yang cukup signifikan adalah beberapa prodi, terutama prodi-prodi kesehatan tertentu yang pembiayaannya bisa tembus sampai M M an.

Jadi, mungkin ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana mungkin kita bisa mendapat tenaga kesehatan yang baik ataupun yang lebih terdistribusi dengan banyak, kalau biaya pendidikan itu sendiri mahal?

Sebetulnya, bagaimana konstruksi ideal komponen pembiayaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi yang menjadikan pendidikan terjangkau oleh lapisan masyarakat? Dan apa solusi kebijakan pendidikan atas permasalahan mahal biaya pendidikan yang selama ini disampaikan oleh masyarakat?

Kami yakin bahwa Pak Fasli, Pak Didik dan Pak Nanang Fatah adalah orang-orang yang sangat kompeten dalam hal ini. Untuk itu kami persilakan memberikan paparannya.

Kita mulai mungkin dari Paramadina dulu, lalu setelah itu dari apa namanya, dari UPI dan nanti ditutup oleh Pak Wamen. Karena sedikit banyak ini adalah ordal Pak, orang dalam. Jadi cukup mengetahui banyak.

Silakan, kami persilakan Pak Didi Rachbini.

REKTOR UNIVERSITAS PARAMADINA (PROF DIDI RACHBINI, M.Sc.,Ph.D.):

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya,*

Terima kasih ya Pimpinan mengundang saya kembali ya. Mengingat saya di forum ini ya dulu sebagai Pimpinan. Tetapi saya sudah kehilangan banyak dari pengetahuan. Karena dari makro, kebijakan politik, ke mikro ya. Ini kebalikan Prof Zainudin, kolega saya dari mikro kampus ke besar, ya *nggak?* Saya mengecil ini. Tapi dalam riset, analisis, diskusi, ada metode induktif, induktif itu dari kecil-kecil ke besar ya.

Jadi mungkin pengalaman saya sebagai Dekan, Rektor ya, bahkan saya menjadi Wali Amanat dan Ketua Yayasan. Jadi yang mengangkat Anis Baswedan itu tanda tangan saya. Kalau saya tidak ada tanda tangan mungkin nasibnya beda, mungkin. Ini kan takdir ya.

Terima kasih ya, teman-teman *nggak* saya sebut satu persatu ya.

Baik, saya punya *slide* sedikit saja ya. Mungkin kulture 10 menit ya, 15 menit. Nanti perlu banyak ya. Saya kasih judul "Politik Pendidikan Tinggi", fokus ke pendidikan tinggi. Politik. Mengapa saya sebut politik? Karena separuh dari pendidikan itu politik. Kalau politiknya itu lemot, seperti pesawat itu *nggak* seimbang. *Nah*, oleh karena itu penting dalam, apa, diskusi ini.

Berikutnya yang kedua, saya ada di tengah-tengah amandemen. Jadi waktu Pak Adi Sasono menjadi Menteri, keluar dari MPR, saya masuk sebagai Anggota MPR dan ada di amandemen berikutnya pada tahun 2000, 1999-2004, saya menjadi tim 7 ya. Tim 7 itu ekonomi tapi saya masuk dalam bidang-bidang yang lain dan Tim 7 itu pecah, Mubyarto, Sri Mulyani, Bambang Sudibyo dan lain-lainnya.

Jadi sejarahnya ini memang ada kelompok kecil yang mencoba mempengaruhi keseluruhan ya, untuk agar pendidikan ini menjadi lokomotifnya, kira-kira begitu, dan disetujui oleh Pimpinan MPR. Karena MPR

kan yang ngetok, tetapi dapurnya di belakang ya. Ini saya ceritakan kisah-kisah bagaimana saya terlibat di dalam ruang-ruang di sana, di pojok itu tempatnya.

Nah, ada dua yang saya ingat, yang sukses. Yang belum sukses ini Pasal 31. Ini agenda Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Pada waktu kami belum sukses juga. Yang sudah sukses Pasal 28H di amandemen itu. Ini contoh saja.

Belum, belum sebelumnya, ini, ini contoh bagaimana nanti politiknya itu harus, Pasal 28H itu negara wajib memberikan, *sorry* memberikan pelayanan kepada warga negara, 28H, sehingga harus ada jaminan dan itu diimplementasikan mulai Ibu Megawati menyatukan seluruh komponen itu.

Kemudian zaman SBY, Menterinya Agus Martowardojo merasa tidak sanggup. Karena ini kalau seluruh Indonesia dijamin kesehatannya. Ini prosesnya bagaimana politik itu berjalan. Dan nanti kita sama-sama kalau memang punya *concern* ya, Mas Dede ya. Waktu itu Pak Agus Marto, kalo ini dilaksanakan APBN jebol. Tapi teman-teman mendongkrak, kalau tidak dilaksanakan, *impeachment* bisa terjadi. Itu kan lobi-lobi apa, tidak keluar. Akhirnya Pak SBY kan, kalau begitu kan khawatir tuh ya. Langsung diimplementasikan. Dan memang pada waktu awal-awal BPJS ini rusak apa, apa banyak jebol dan segala macam, tapi sekarang *alhamdulillah* bagus. Sopir, orang tidak mampu, segala macam, berhasil apa, mendapat pelayanan. Itu sudah 100 tahun lalu dijalankan di Amerika ya, di Jerman, sejarah ini. Pak Sulastomo aktif ya. *Nah* saya berharap politik pendidikan itu meniru ini. Harus dengan ancaman-ancaman juga, kalau *nggak*, ancaman politik dalam tanda kutip.

Lanjut ya, lanjut ya, saya pendek saja. Ini kan sudah dibicarakan, sudah menjadi pengetahuan umum di sini ya. Tidak perlu saya, apa namanya, tadi Pak Pimpinan menyampaikan, yang di luar Kemendikbud rasio permahasiswanya bisa 60 juta, betul ya? Saya belum lihat datanya dan memang itu *enjoy* dengan menggunakan dana itu dan kita harus melakukan upaya. Lanjut ya.

Nah, pendidikan tinggi sendiri kira-kira hanya 1% dari APBN. Ini di bawah Pak Wasli dan kalau kita mau membagi ya, Paramadina ini ingin mengambil peran tanpa uang negara satu sen pun. Coba kita dengar ya. Karena, saya ada di sini, terhormat, ini penting.

Paramadina itu didirikan oleh intelektual besar seperti kita, *dhuafa*, ingin berperan di dalam pendidikan tinggi, tanpa didukung satu sen pun anggaran negara. Tapi itu dirusak oleh perguruan tinggi negeri yang ada di puncak. Punya ratusan profesor, dia menggaruk mahasiswa sebanyak-banyaknya, sehingga merusak semua peran-peran kita. Coba bayangkan tidak ada satu sen pun waktu mendirikan, dan itu Profesor Nurcholis, *dhuafa*. Karena itu, di forum ini, ada baiknya perguruan tinggi riset itu seperti UI, UGM, Unpad, Undip, masuk ke yang besar, diberi anggaran yang cukup. Jadi, tidak tidak mengganggu kita yang mau berperan. Nanti lama-lama kita mati, artinya usaha kita itu dihalangi oleh politik di sini.

Nah karena itu kita harap swasta itu diberi peran, terutama Muhammadiyah ya. Ya itu kampusnya Prof Zainudin. Kalau yang besar sudah mapan, *nggak*. Ini kan Muhammadiyah Bapak-Ibu sekalian, Muhammadiyah itu akan akan tumbuh. Muhammadiyah itu berkumpul saja di musala, bikin perguruan tinggi itu di, di apa, di Pamekasan, di Bangkalan, bisa hidup. Tapi kalau dengan masif seperti ini, semua anak-anak baik keserap ke Brawijaya, mahasiswanya 65.000, habis semua ya. Dia membunuh kesempatan orang-orang lain untuk pemeratakan pendidikan ya. *Nah* ini kira-kira politiknya.

Lanjut, sekarang saya mengajukan politik pendidikan ke depannya. Langsung saja karena masalahnya sudah tahu. Sudah tahu *nggak usah* kita bicarakan.

Yang pertama Bapak-Ibu sekalian, saya, politik yang pertama ya, saya ini mengajukan reformulasi kebijakan pendidikan dan pendidikan tinggi, terutama pendidikan tinggi ya. Ini untuk memastikan penggunaan dana 20% sejalan dengan kebijakan di pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan harus ada relevansi langsung dari penggunaan dana pendidikan tersebut.

Kalau ada K/L di luar, kalau ada K/L di luar ya, Kemendikbud menghasilkan doktor sama dengan doktor yang kita hasilkan ya, bidang diplomasi, bidang ini dan seterusnya, dana kita hanya 10 juta per mahasiswa, mereka 60 juta per mahasiswa, harus dipotong. Jangan pakai hanya, jangan pakai hanya bicara pakai, memakai konsultan internasional seperti Price Waterhouse Coopers diketok diketok di panja, di pansus kalau perlu.

Nah, bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Ya apa politik anggarannya segala macam dipakai di sini. Jadi reformulasi itu saya kira penting, tidak hanya rekomendasi, tapi mulai dari studi studi evaluasi, studi kebijakan dan seterusnya ya. Sehingga pendidikan tinggi itu persis seperti Pak Dede tadi, Pimpinan tadi, di ruang tunggu. Ya saya tidak usah menjalan, tidak usah mengulangi lagi, dibagi peran-perannya masing-masing dan perguruan tinggi seperti UI, UGM segala macam yang sudah lama sekali, hampir satu abad itu ada di paling *underdog* di Asia, ya.

Jadi saya mantan ketua MWA IPB ya. Untuk menuju ke sana, risetnya kan sudah setengah triliun lebih ya, banyak, tetapi di dipacu juga untuk memperbesar mahasiswa karena posisi BHMN. *Nah*, posisi politik ini jangan di apa, jangan dijadikan wajib. Sehingga dia memaksa untuk mengambil mahasiswa yang banyak, tapi fokuskan dia di situ ya.

Yang kedua, politik yang kedua, evaluasi dampak akses dan mutu pendidikan. Misalnya Kementerian Keuangan menghasilkan akuntan. Itu ada ratusan universitas pendidikan tinggi yang menghasilkan akuntan yang sama, tidak perlu lagi itu, harus dibubarkan, ya.

Ada satu bidang tertentu menghasilkan Kebijakan Publik, Kementerian Dalam Negeri, punya kebijakan publik, sama dengan yang dihasilkan, ya sudah itu ditransformasi menjadi universitas biasa.

Nah, sehingga evaluasi dan kan begini, kementerian lain merebut anggaran, dampaknya apa? Menghasil akuntan, akuntan dulu memang, itu namanya apa pendidikannya Kementerian Keuangan, akuntan memang *nggak* ada, susah.

Saya membayar sebagai Dekan, tiga kali daripada Dosen Manajemen. Karena itu disebut, apa man, binatang langka karena dia dibayar mahal dan waktu itu apa, akuntan India sama, dan dan Philipine menyerbu sini, sekarang sudah banyak. Jadi tidak perlu lagi dia menyerap anggaran banyak yang rasionya 30-40 juta mengalahkan yang lain, menghasilkan yang sama.

Jadi evaluasi dampak, ini, ini tidak jadi kesimpulan kita saja, tetapi mungkin jadi apa, evaluasi Price Waterhouse Coopers, harusnya apa yang internasional? Niru Bappenas begitu? Apa Pimpinan Komisi X bersama Kementerian Pendidikan untuk bagaimana pendidikan masuk ke dalam politik yang kuat seperti BPJS tadi, ya?

Pak Agus Marto sudah terang terangan mengatakan tidak bisa ini. Kalau tidak bisa ya ini soal *impeachment*, apa namanya, itu kan melanggar Pasal 28H. Sekarang bagus Pak, apa namanya rumah tangga, sopir saya, segala macam berhasil. Bahkan saya sendiri memakai BPJS, walaupun saya punya, walaupun saya punya perusahaan apa asuransi yang komersial ya, sangat komersial.

Itu bagus sekali yang BPJS. Mau naik ke tingkat satu, saya hanya nambah keluar 5-60 juta, nambah 10 juta. Bagus ya. Lanjut ya, saya tidak usah lagi nih, banyak rentetannya ya, efektifitas penggunaan dana dan seterusnya ya.

Sekarang *break* terakhir ya. Lanjut, lanjut. *Nah* ini Bapak-Ibu sekalian ya. Politik pendidikan tinggi swasta dan negeri, saya mengatakan tadi ini dari hati nurani saya. Paramadina saya ikut mendirikan ya, modalnya itu teman-teman *ngerogoh* saku untuk menyewa ya. Saya baru selesai Doktor, *nggak* punya uang, tidak bisa berkontribusi. Jadi tidak, tidak ada satu sen pun duit untuk membangun itu, tapi sewa. Sekarang pun masih ada di gedung Bank Mandiri ya di, di Gatot Subroto. Tapi kita sudah punya kampus besar 10.000 dari dana CSR, di Cilangkap. Punya juga di Cikarang, baru buka hampir 1000 ya. *Nah*, ini *nggak* bergerak banyak ketika di, di apa, ditutup oleh apa, program pendidikan di masing-masing perguruan tinggi itu ya.

Yang pertama saya usulkan pilihan kualitas apa, kualitas dunia untuk pendidikan tinggi dan keadilan. Kualitas level dunia itu dipegang oleh UI, UGM, IPB kampus saya, Unair dan lain-lain, 10 lah, itu tidak boleh ya. Rasio Undip, rasionya dulu ketika diterapkan rasio 1 banding 200, sementara padahal itu 1 banding 40 atau 20. Ya tapi mereka merekrut aja banyak-banyak, sehingga politik pendidikan ini kacau, gitu.

Jadi pilihan kualitas itu perguruan tinggi negeri memberikan standar yang baik dan masuk ke kelas dunia. Riset yang kuat menjadi riset *university* untuk ekonomi bangsa. Seluruh ekspor kita, itu konten dari seluruh ekspor kita, ini dampaknya ya, seluruh ekspor kita konten riset dan teknologinya paling rendah di ASEAN. Itu pernah dicapai pada waktu Presiden Soeharto ketika ngebut industri, pertumbuhan ekonomi 7%, industrinya tumbuh 12%. Sekarang ekonomi tumbuh 5%, industrinya tumbuh 2%.

Janji Prabowo untuk 7% mustahil meskipun malaikat yang akan membantu pertumbuhan ekonomi, karena industrinya tumbuh 3%, sekarang naik 4%. Dulu 7% industrinya, tumbuh 12%, ekspornya 25%. Bunga waktu itu, bunga pada waktu 14%, ada KLBI 5%, untuk sawit ya, 100 hektar 100.000 hektar diimplementasikan 10.000, sisanya 90 ditabungkan lagi, dia beternak uang zaman dulu ya. Ada, ada banditnya tetapi berhasil sawit sekarang ya. Jadi kualitas dunia harus diemban oleh perguruan tinggi negeri ya.

Yang terakhir, yang ketiga, yang kedua, pemerataan akses didanai oleh perguruan tinggi negeri pada level 2 dan mungkin kalau ada Panja dibentuk kampus-kampus tingkat provinsi yang menjadi kewenangan daerah.

BPJS dulu tidak mampu dikasih ke Pemda, ini bagian *you* yang bayar, yang membayar akses, karena mereka politiknya ingin diakui oleh masyarakat. Seperti Bekasi membayar 200 miliar dari 6 triliun ini-nya, sehingga *sharing*, dan pendidikan *sharing* ke daerah ini akan makin bagus ya, terutama fokus pada vokasi ya.

Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian yang berikutnya, apa saya punya sudah semua ya, tetapi intinya, kesimpulannya supaya tidak banyak. Ini saya tahu waktu di sini sangat penting buat Pimpinan dan Anggota ya.

Jadi politik pendidikan kita harus dirubah tidak seperti sekarang semuanya masal ya. Kemudian untuk dana alokasi 20% yang ter, tercerai-berai di mana-mana dan itu, itu politik pokrol, rebut-rebutan. Saya tahu, karena saya pernah di sini. Kalau pokrol, ya kita coba cari hukum yang pokrol juga, tapi dengan menggunakan.

Kata Pak SBY *wah*, itu kalau Pasal 28 dilaksanakan, itu *impeachment* dong, Pak SBY takut, jadi terpaksa. Jadi pada waktu diimplementasikan pertama, kacau. Waduh Rumah Sakit Muhammadiyah habis *nggak* dibayar oleh pemerintah, sekarang bagus ya.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Didi.

Jadi politik anggaran ini penting juga ya. Memang terjadi transformasi belakangan ya setelah kita musim Covid waktu itu. Pada waktu Covid itu ada

Perpres atau PP, saya lupa yang mengatakan pemerintah tidak perlu berkonsultasi dengan DPR. Perpu ya? Waktu itu ada, lalu itu mestinya berlaku masa Covid, tapi terus keterusan. Sehingga kadang-kadang DPR juga tidak pernah diajak, kita hanya *given* saja. Ya ini akhirnya pembicaraan harus kita teruskan pada dewa-dewa lah nanti.

Terima kasih Pak Didi.

Berikutnya saya minta Pak Nanang Fatah untuk memberikan paparan, silakan.

GURU BESAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UPI (Prof. Dr.H. NANANG FATAH, M.Pd.):

Terima kasih.

*Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bismillah alhamdulillah washolatu wassalamu rasulullah sallallahu wasalam,*

'Alhamdulillah' kita panjatkan sudah bisa bertemu dalam kondisi sehat *walafiat* semuanya.

Yang terhormat Pimpinan Komisi X dan anggotanya yang tidak bisa sempat saya sebut satu persatu,

Tidak mengurangi rasa hormat, saya lihat ada Pak Pahmi nih. Wah ini sahabat saya di Hufi dulu, *alhamdulillah* silaturrahmi.

Narasumber, Prof. Didik, Prof. Fasli, saya ketemu lagi ini dengan Pak Fasli, 2006 ketemu di Hotel Mulia dalam memperingati sewindu reformasi saya ingat ini. Sekarang ketemu lagi.

Bapak dan Ibu sekalian,

Saya bergembira, semula saya tidak bisa hadir karena karena ya kondisi usia sebetulnya sudah pensiun di usia, sudah menggenap pensiun Pak Fasli, 3 tahun saya. Tapi ya *alhamdulillah* saya diminta untuk berbagi pandangan ya mengenai masalah pendidikan ini.

Ada empat poin yang saya ingin sampaikan sebetulnya ya. Yang pertama saya ingin bicara mengenai konsep dulu, dari kajian pembiayaan pendidikan dari struktur konsep sebenarnya ya. Yang kedua, saya ingin melihat dari bagaimana struktur biaya.

Mengapa pendidikan itu tinggi biayanya? Sampai saya pernah menghitung itu, biaya pendidikan Dikdaspen itu, itu, itu tahun 2006 waktu saya di BSNP itu sudah menghitung itu bisa habis 1 APBN sebenarnya, bukan 20%, satu APBN habis. Kalau bener-bener pendekatannya kebutuhan dan berbasis pada mutu ya, ya, bukan berbasis pada *budget*, tapi berbasis pada program-

program pengembangan mutu ya. Yang diperlukan dengan standar-standar yang ditetapkan oleh BNSP ya. Itu, itu habis itu sebetulnya. Nanti dengan lihat mengapa sampai tinggi ya, gitu.

Dan yang ketiga, saya ingin melihat bagaimana partisipasi atau subsidi yang di diterima oleh sekolah ya, dari berbagai sumber seperti dari APBN, dari APBD tingkat 1, dan APBD tingkat 2, sebab sebenarnya itu kan 20% dari APBN, 20% dari APBD tingkat 1 provinsi dan 20% dari kabupaten, kota, Pemda juga. Tapi itu, mengapa itu tidak terjadi yang diharapkan seperti itu ya? Sementara biaya itu dihitung 1 APBN habis sebetulnya dan sampai saat ini tidak tidak sampai kejadian seperti itu.

Yang keempat saya ingin berbicara apa kendala dan solusinya sebenarnya ya. *Nah* dari empat poin itu, saya ingin mengantarkan dulu itu konsep bahwa pandangan masyarakat terhadap bagaimana pendidikan sebagai *human investment*, itu belum paham semua.

Termasuk itu saya memperhatikan para pembuat kebijakan pemerintah, apalagi rakyat gitu ya, bahwa pendidikan masih dipandang sebagai konsumtif gitu. Buang aja membuang uang gitu, tapi saya paham bahwa itu pendidikan buang uang ya, dana *innalillahi wa innailaihi rojiun*. Kalau memang bermasalah dari pendidikan juga tidak menjanjikan uangnya itu bisa kembali. Sekolah tidak bisa kerja ya, bahkan angka pengangguran tinggi ya sekarang, tingkat pengangguran terdidik penangguran terbuka saja itu sangat tinggi ya, jadi itu sulit sekali ya untuk meyakinkan itu. Di kalangan para akademisi juga ini masih susah untuk meyakinkan ini belum ada prodi ekonomi pendidikan, belum ada prodi politik pendidikan.

Saya kira Pak Didik sudah ada prodi politik pendidikan *nggak*? Karena ini harus ada ahlinya yang benar-benar bisa memperdalam bidang ini sebenarnya ya. *Nggak* ada doktor di bidang politik pendidikan, doktor di bidang ekonomi pendidikan, itu belum ada saya kira.

Jadi pantas saja kalau misal pemahaman ini kurang bagus ya, jadi pemahaman, jadi saya berangkat dari asumsi ya, struktur konsepnya namanya. Jadi, jadi untuk membahas tentang pembiayaan pendidikan itu harus berangkat dari suatu pandangan bahwa kemajuan suatu bangsa itu, tingkat kemakmuran suatu bangsa itu akan dipengaruhi oleh tingkat kualitas SDM ya dan daya saing globalnya, gitu. Jadi, itu, ini sesuai pengantar dulu di suatu konsepnya sebelum sebelum ke sana ya.

Nah, tingkat kemampuan kualitas SDM suatu bangsa, daya saing suatu bangsa juga dipengaruhi bagaimana kualitas pendidikannya, dan kualitas pendidikannya kualitas sekolah, itu akan dipengaruhi seberapa besar kontribusi biayanya.

Nah, di sini biaya dipandang sebagai investasi ya yang bisa menghasilkan dalam konsep nanti, konsep *human capital*, *human capital*, manusia modal, manusia modal itu aset. *Nah* ini yang tidak bisa, yang harus

kita yakinkan bahwa untuk bisa menghasilkan manusia modal, *human capital*, yang punya intelektual kapital tinggi, yang punya spiritual kapital tinggi, adab.

Jadi sekarang saya meng, eh, eh, Pak Pahmi ya agak khawatir. Saya melihat tingkat pendidikan tinggi S2 S3 tapi *loss of adab*, ini apa yang terjadi ya? Akademik tinggi tapi adab, padahal adab itu penting sekali dalam pendidikan itu sebetulnya ya ini.

Nah, ini yang jadi masalah sasaran pendidikan biaya tinggi itu ke mana ya sebenarnya menghasilkan bangsa dengan daya saing yang rendah dengan berbagai versi ini.

Nah, jadi ini baru saya akan mulai ya dari struktur berpikir bahwa pendidikan dipandang sebagai investasi itu menghasilkan sekolah yang bermutu. Sekolah yang bermutu itu akan menghasilkan SDM yang bermutu. SDM yang bermutu akan menghasilkan pendapatan yang tinggi, karena produktivitasnya tinggi dan menjadikan negara makmur. Kalau itu suatu, negara makmur, kembali lagi daya bayarnya juga akan tinggi, akan mampu.

Jadi ini yang menjadikan pendidikan itu bukan soal mahal, pendidikan itu dari dulu mahal, bukan mahal, tinggi, karena sebagai barang yang tinggi berkualitas tinggi, pendidikan juga sama, itu merupakan biaya tinggi.

Soal mahal dan murah itu, itu yang dirasakan oleh yang miskin dengan yang kaya sebetulnya. Yang punya daya bayar tinggi tidak merasa mahal ya. Yang menjadikan sekarang mahal itu, karena daya bayarnya, *ability to pay*-nya itu rendah sekali ya. Sehingga dirasakan mahal. *Nah*, menjadikan berbiaya gratis atau murah karena disubsidi oleh pemerintah ya. Ya mulai dari pendirian dasar sampai S1 digratiskan, dikasih beasiswa ya itu menjadi murah. Tapi kalau tidak disubsidi oleh pemerintah, ya itu tetap mahal, karena daya beli masyarakat yang semakin rendah karena penganggurannya tinggi.

Tadi angka pengangguran SMK aja, angka penganggurannya tinggi 9% data dari yang saya baca itu, dari indeks daya saing 2003 itu, itu tinggi sekali. SMK itu penganggurannya tinggi sekali itu 9, paling tinggi 9,42. SMA 8,57 gitu ya. Jadi ini pengangguran terbuka BPS tahun 2002 ya. Perguruan tinggi 4-5% ya.

Nah, ini menarik sekali. Dari segi *global innovation index* juga itu rendah sekali. Itu, itu di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Vietnam, di bawah Philipine. Kita terendah *global innovation index*-nya.

Itu akibat dari tadi, dari berapa biaya yang dikontribusi oleh pemerintah, baik dari APBD, apa APBN, APBD 1 APBD 2 yang dibutuhkan itu berapa persen idealnya, maka saya akan lihat kepada ini kepada khasiat kajian.

Saya, di dalam hasil kajian ini, saya melakukan suatu kasus ya, sebetulnya ya. Di kota Bandung itu, penelitian pendidikan dasar, menengah, menengah ya, teknologi, teknologi dan SMK maksudnya, ada dua yang non

teknologi dan teknologi, jadi beda SMK juga itu beda. Ada yang misalnya kalau akuntansi misalnya, itu non teknologi, itu biayanya lebih rendah. Tapi kalau misalnya mesin, pembangunan itu, itu lebih tinggi ya.

Nah, jadi ini, model yang digunakan atau pendekatan yang digunakan di dalam studi ini, ini menggunakan tidak berbasis pada eh anggaran, *budget*, tapi pendekatannya pada kebutuhan. Makanya disebutnya *learning activity based costing* Jadi pembiayaan berbasis pada kebutuhan aktivitas pembelajaran gitu, bukan dari RKAS (Rencana Anggaran Sekolah) ya bukan, tidak, jadi langsung berapa.

Nah, dari studi, coba tolong dipaparkan yang studi, minta saya tolong yang kertas yang, *nah* ini. Tapi sebelum ini saya minta yang itu dulu, yang struktur anggaran dulu, struktur anggaran, *nah* sebelum ini strukturnya dulu eh struktur yang BSMP. Mengapa tinggi? *Nah* ini, ini, ini, yang ini. Nih kerangka pemikiran ini, mengapa tinggi? Karena banyak komponen yang harus dibiayai coba.

Jadi biaya pendidikan, satuan pendidikan, *unit cost* per siswa, per jenjang itu, itu besarnya, kategorinya ada biaya operasional, ada biaya investasi, ada biaya pendidikan peserta didik. Artinya pribadi yang dikeluarkan oleh orang tua oleh siswa sendiri di luar, di luar yang dikelola oleh sekolah.

Nah, sedang yang dikelola oleh sekolah itu biaya operasional, terdiri dari biaya operasional personalia ya, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu guru dan staf di situ ada ya dan ada biaya yang disebut operasional. Yaitu ada berapa, ada alat, ada pemeliharaan, ada perbaikan, ada biaya dan jasa transportasi, konsumsi.

Nah, itu saja kalau misalnya dihitung untuk makan siang gratis, konsumsi, itu kemarin kan dewan telah menghitung itu habis itu 20% untuk makan siang gratis dengan *unit cost* 20.000 per siswa. Bayangin. Bayangin aja itu untuk belum yang lain-lain bayangin aja. Belum biaya investasi, biaya lahan, ada bisa biaya untuk pengembangan tenaga kependidikan, belum. Itu komponen-komponen biayanya itu, itu yaitu untuk pelatihan meng-*upgrade* kompetensi guru ya yang sudah ketinggalan kompetensinya, itu berapa diperlukan ya dari berbagai jenjang.

Nah, masuk sekarang kepada biaya investasi yang sifatnya membeli lahan, membeli, peralatan pendidikan, bangunan, *mebeler*, itu berapa dari diperlukan? Masuk sekarang yang lebih besar lagi, berapa? Ini lebih besar lagi nih. Biaya, biaya yang dikeluarkan orang tua masyarakat jauh lebih besar dari biaya yang dikelola oleh sekolah ya. Itu nanti ada studi studi kasus hasilnya di sini bisa dihitung nanti, sebetulnya berapa biaya yang diperlukan. *Nah*, sekarang saya masuk langsung pada hasil aja dari itu. Mengapa tinggi sekali, ya? Dengan pendekatan, coba sebelum ini ada pendekatan dulu, sebelah model, terus.

Nah ini nih, ini nih model, model yang digunakan untuk studinya ya ini aplikasi model dari ABC, ABC tadi (Activity Based Costing) dalam pendidikan. Ini model ini jarang digunakan, seringnya pendekatannya pendekatan *budget* ya. Ini pendekatan yang berdasarkan pendidikan *cost-quality relationship* ya. Jadi di mana yang menjadi *cost driver*, pemicu tadi mutu, pemicu biaya tinggi itu berada pada *learning activity*.

Jadi, makanya *learning activity* ilmu sosial, *learning activity* ilmu kedokteran, *learning activity* teknologi, itu beda biayanya. Itu yang membedakan *cost driver*-nya ya. Itu yang, itu beda-beda, makanya UKT itu beda-beda, di atau BOPTN per prodi itu harusnya beda, berdasarkan karakteristik kebutuhan bidang studinya gitu, bukan dibagi rata per PTN bukan, pendekatannya ya. Jadi itu, karakteristik bidang studi itu jadi pertimbangan, karena itu pemicu biaya itu *cost driver*-nya ya.

Nah, oke, saya ingin lanjut ke berikutnya bagaimana hasilnya. *Nah*, ini ini hasil dari studi bagaimana *unit cost* per jenjang itu. SD sekarang *kan* pendidikan dasar digabung ya, SD-SMP itu, tinggal gabung aja. SD 1.700.000 per tahun ditambah 3.500.000, itu hampir 4.700.000 pendidikan dasar. Sekolah menengah itu Dikmen, itu SMA 4.600.000 *unit cost*, SMA kejuruan teknologi, non teknologi lima juta lima sekian dan tadi yang teknologi 6.500.000 sekian.

Nah, terus saya ingin menunjukkan ya ini komponen-komponen biaya yang tadi menjadikan *unit cost* ya ini komponen-komponennya rinciannya besarnya PBM ini maksudnya.

Terus itu, sekilas ya terus, saya ingin ke rekap saja, rekapnya, rekap. Oke ini komponen-komponen tadi yang yang diteliti, mengapa jadi besar seperti itu, terus, terus, terus, lanjut, lanjut, lanjut, oke lanjut semua. Lanjut, rekapnya, saya ini karena waktu aja.

Nah ini ya, *nah* ini menarik saya ya, menariknya mengapa? Itu dari kebutuhan ideal misalnya ya untuk kebutuhan biaya operasional yang dikelola sekolah itu SD misalnya 1.700.000 ya itu diperlukan itu, berapa gitu, dari APBN itu 580.000. Itu bisa baru mensubsidi 34% terus, dari APBD tingkat 1 itu 1,47%, dari APBD 2 Kabupaten, Kota 9,7% dan seterusnya bisa dilihat. SMP, SMA terus seperti itu seperti data seperti itu, itu *average* ya. Rata-rata APBN itu baru mensubsidi kurang lebih 30% dari kebutuhan ideal ya, baru 30% mensubsidi dari kebutuhan ideal dan dari APBN. Eh APBD tingkat 1 ya, itu dibawah, masih 5% dan nyaris APBD tingkat 2 ya, sebetulnya juga itu tidak akan tidak berbeda dengan kemampuan APBD 1 ya. Jadi, konsep desentralisasi pendidikan ya, yang di angkat atau diberlakukan oleh pemerintah itu dengan *power sharing*, *resource sharing*, tidak terjadi ya.

Ya maksudnya kan otonomi daerah itu dengan otonomi pendidikan dengan diangkatnya model Schoolist Management, School Based Management. Management berbasis sekolah dan itu diteliti oleh Balitbang, itu menunjukkan bahwa mutu pendidikan turut ditentukan oleh manajemen

sekolah, dengan model manajemen berbasis sekolah, School Based Management yang diadopsi di Amerika, di kita tahun 2000.

Saya bikin buku, saya diangkat itu untuk jadi konsultan, saya kembangkan, saya teliti ini nyaris tidak jalan sampai sekarang. Mati itu juga, model School Based Management di Indonesia ya. Karena tidak didukung dengan anggaran dan partisipasi dari tadi secara proporsional pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, ya gitu. Ini tidak berbicara swasta. Kalau swasta nyaris itu masyarakat totalnya. Kecil sekali itu dana yang diterima oleh perguruan tinggi swasta, apalagi perguruan tinggi Agama Islam misalnya yang Madrasah sangat-sangat kecil itu. Jadi sementara MBS itu sangat mengandalkan kemandirian dari masyarakat. Masyarakat dengan daya beli yang rendah, itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan.

Jadi kalau mutu pendidikan itu sangat-sangat rendah wajar. Saya dapat pahami ya, dengan dengan kemampuan daya bayar masyarakat yang rendah, dengan subsidi pemerintah yang sangat masih jauh gitu ya.

Jadi kalau kita berbicara peruntukan dari 20% itu, itu dulu ide awalnya zaman reformasi 98, itu bukan untuk pendidikan di luar Kemendikbud, tidak, itu karena sudah dihitung itu kalau total satu APBD habis. Itu untuk peningkatan mutu sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kemendikbud waktu itu. Tidak di luar itu, sekarang salah sasaran. Ini tadi, salah sasaran. Kementerian, sekolah dinas ya, bahkan lembaga-lembaga negara dikasih, disalurkan dari biaya-biaya itu ya. Ini juga terjadi, salah, terjadi. Jadi ini inkonsistensi kebijakan ya dari, dari sudut itu.

Oke, *nah* ini coba hitung berapa kalau, kalau kita mau menghitung aja simulasi dengan data yang ada berapa total jumlah siswa yang ada di Indonesia setiap jenjang. Tinggal ngalikan aja *unit cost*-nya ya dari berbagai itu jenis biaya, biaya tadi operasional, biaya investasinya berapa, itu ada data dan total biaya itu tinggi sekali itu yang, yang biaya personal orang tua itu paling tinggi coba.

Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua, itu dari SD aja sampai 13, eh 9 ya. SMA teknologi itu, itu dua apa, berapa tuh, 17 juta per totalnya itu. Itu kalau total SMA teknologi 30 juta *unit cost*-nya per orang tuh di total, total biar, coba makanya itu habis ya. Itu tinggal disimulasikan aja dicoba disimulasi estimasikan dengan jumlah mahasiswa total secara nasional.

Ini sampel, ini sampel Kota Bandung ya, sampel jadi tinggal ngalikan aja berapa besar biaya ya. Habis itu satu APBN, jadi jangan merasa besar dengan 20% itu tidak, tidak merasa besar ini.

Saya ingin meluruskan ini juga ini ya di sini, ini berdasarkan kajian berdasarkan kebutuhan ideal dan berdasarkan, apa faktual yang ada di lapangan, berapa kemampuan dari sisi penerimaan. Karena kalau soal studi biaya itu gampang, berapa penerimaan, sumbernya berapa berapa yang digunakan ya, ya dan digunakan sesuai dengan fungsinya, ini *cost function*

namanya fungsi biaya itu untuk apa pendekatannya. Bukan asal keluar duit, tapi fungsi biaya itu Pak, makanya di standar biaya ada tiga kriteria seperti itu.

Nah itu sekilas tentang mengapa tinggi ya, mengapa dirasakan mahal seperti itu ya. Dan apa kendala-kendala karena berbicara tentang mutu. Itu bukan berbicara dari sudut anggaran saja. Anggaran itu hanya salah satu faktor ya, faktor lain banyak yang menentukan mutu pendidikan gitu ya.

Apa saja, dan dalam studi ini ini terutama *management, management* ya *management* sekolah ya, terutama prinsip penerapan prinsip-prinsip ya *good schooling governance* ya, *good university government* ya. Bagaimana prinsip transparansi, *accountability* dilakukan, prinsip efisiensi dilakukan ya, oleh para pengelola pendidikan itu ya, bagaimana prinsip *equity-equality* keadilan dilakukan ya? Ini belum terjadi, belum optimal terjadi, rendah. Jadi kemampuan para pimpinan pendidikan di tingkat institusi itu masih lemah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* ya, termasuk PTNBH.

PTNBH juga sama. Kan, idenya PTNBH itu bagaimana dia bisa mandiri dan mutu, sama dengan ide MBS kalau di Dikdasmen ya, manajemen berbasis sekolah, bagaimana sekolah itu mandiri dan tetap mutu tinggi. Sama PTNBH juga, bagaimana otonominya tinggi, mandiri, bagaimana juga dari segi anggaran mandiri, bagaimana juga *mutual*-nya tinggi ya. Tapi yang terjadi pimpinan perguruan tinggi di PTNBH tidak bisa memobilisasi *resources* ya, yang tidak bisa mendatangkan *income generating* yang tinggi. Sehingga UKT tetap tinggi gitu. Ini kemampuan manajemen yang lemah, gitu.

Jadi salah satu hal yang harus di-*upgrade* adalah bagaimana kemampuan manajerial dari para pimpinan pendidikan di tingkat institusi, di *upgrade* kemampuan manajerialnya. Bahkan mulai dari bagaimana merancang pendidikan, ya perencanaan, *planning, planning, programming, budgeting* itu lemah semua ya. Membuat *planning* bagus tidak didukung dengan *budgeting*, itu kata saya mimpi itu namanya. Membuat renstra tanpa *budget*, mimpi namanya. Iya mana rencana anggaran? *Nggak* ada, itu mimpi namanya, bukan Renstra. Renstra itu harus didukung dari dan rancangan anggaran yang benar yang layak, itu baru Renstra. Ini banyak perguruan tinggi banyak sekolah buat Renstra tanpa didukung dengan studi anggaran, kelayakan anggaran, rancangan anggaran ya yang. Yang benar-benar berdasarkan *cost function* ya, fungsi biaya itu apa, nilainya, jadi ada *value for money*, itu benar-benar perhitungkan. Ini tidak. Jadi duit itu datang terus tinggi, tidak meningkatkan mutu. Mutu tetap itu, itu inefisiensi, terjadi inefisiensi ya. Itu yang itu salah satu kendala utama yang saya lihat ya di itu.

Yang kedua, memang tidak punya fokus. Kalau kita belajar kepada Singapura, mengapa Singapura itu hebat? Singapura itu negara hebat sekarang *human capital index*-nya nomor satu di 130 negara yang disurvei. Itu dia punya fokus, pendidikan dasar itu *good citizen* sudah, *good citizen* pendidikan dasar itu. Jadi pendidikan akhlak lah, pendidikan moral tuh itu. Itu fokus ke sana walaupun sebagian ada pendidikan akademik, tapi dominannya pendidikan moral, pendidikan moral dominan muatannya. Jadi muatan-muatan

untuk moral, etos kerja, disiplin, tanggung jawab, itu tinggi di pendidikan dasar ya. Karena itu usia ya emas yang harus dibentuk ya.

Setelah itu baru setelah adab dibentuk, setelah akhlaknya bagus ya, moralnya bagus, pendidikan menengah baru fokus ke penguasaan saintek ya. Saintek baru, itu pendidikan menengah. Pendidikan tinggi baru itu fokus kepada *human capital*, artinya membentuk aset-aset yang sesuai dengan pasar kerja, dia fokus.

Jadi produk-produk yang tidak ada mahasiswa dibubarkan, di *off* aja gitu. Ini tidak berani di *off*, prodi tidak laku juga, terus saja karena dosennya tidak berani untuk menutup prodi-prodi yang, banyak sekarang prodi yang tidak laku itu ya. Itu pemborosan gitu ya.

Jadi, satu kelemahannya manajemen pada dia, kemampuan manajerial yang lemah. Kedua ya tadi prinsip *good governance*. Kedua tidak, tidak ada fokus. Jenjang pendidikan tidak punya fokus ya itu. Supaya itu ambil contoh aja *best practice* Singapura gitu ya, dan itu diikuti oleh juga Korea. Korea Selatan sama. Makanya Korea Selatan hebat, gitu.

Nah, yang saya ingin angkat lagi reformasi pendidikan belum terjadi, belum. Saya waktu dengan Pak Fasli tampil di Hotel Mulia, masih ingat saya melontarkan, waktu itu SBY mau itu presidennya, saya diminta oleh Ihsanudin Noor ingat, oleh Ihsanuddin saya diminta untuk merumuskan apa reformis pendidikan.

Kata saya kalau mau mereformasi pendidikan, kata saya itu harus diubah itu lama sekolah. Lama sekolah itu berani *nggak* dari SD 6 tahun jadi 4 tahun, 2 tahun itu menghemat biaya, selain waktu ya. Berani *nggak* mengubah SMP dari 3 tahun jadi 2 tahun, kata saya. Berani *nggak* mengubah itu. Tentu nanti implikasinya pada kurikulum dan dosen dan guru ya. Berani *nggak* mengubah SMA dari 3 tahun jadi 2 tahun. Jadi wajib belajar itu tidak 12 tahun cukup 8 tahun, ya.

Kalau usia kerja itu 15 tahun pas. Dia masuk SD 7 tahun ditambah 8 tahun dia sudah wajib kerja 15 tahun, pas ya. Ya iya dan itu 4 tahun itu inefisiensi, pemborosan, karena banyak mata pelajaran diulang-ulang, di berbagai jenjang diulang-ulang. IPA, IPS, PMP, diulang-ulang semua. Itu pemborosan, lama di sekolah. Jadi anak-anak kita terlalu lama di sekolah waktu kerja habis 4 tahun dihabisin.

Nah itu dalam teori ekonomi pendidikan, itu ada *opportunity cost*. Ini ilmunya Pak Didik sebetulnya, Pak Didik, ada *opportunity cost* yang hilang, *learning for gone*, 4 tahun, sementara dia. Jadi tinggi sekali kalo dihitung tadi biaya itu, itu lebih tinggi kalau plus *learning for gone*, *opportunity cost* yang 4 tahun, tinggi. Sementara dia harus sudah kerja, ini masih tinggal di sekolah, terlalu lama di sekolah ya. Itu pendidikan zaman Belanda, zaman Jepang belum diubah sampai sekarang. Penjajahnya *nggak* ada, kitanya masih menerapkan sistemnya gitu. *Nah*, implikasi dari ini kalau dikaji, ini kurikulumnya

a life skill 70% praktik hanya 30% teori. Tidak habis untuk teori gitu implikasinya.

Yang kedua sistem pelajarannya selain desain kurikulumnya diubah, sistem pelajarannya juga diubah, metode pembelajarannya diubah ya, strategi pembelajaran diubah. Ini ilmu pedagogi, ini didaktik pedagogi ini masuknya. Ini ahli pendidikan yang tahulah ini itu tapi itu serahkan aja dikaji ya implikasi dari perubahan yang yang tadi secara struktur itu ya.

Dan yang ketiga ya tentu aja berimplikasi pada kuncinya pendidikan, ada pada kurikulum dan dosen. Dosennya harus kompeten. Kompeten tinggi betul-betul, harus di *upgrade*. Banyak dosen yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan gitu apalagi kalau sekarang dituntut *world class university*. *world class university* kalau lihat, wah jauh ranking kita itu dibandingkan Malaysia aja lima perguruan tinggi elit di Indonesia itu di bawah UKM semua. Di bawah Sultan Idris, jauh dengan kriteria *word class*. Terutama riset-riset yang inovatif ya, itu lemah sekali ya. Dari dosen yang berkelas internasional dia lemah ya, karena kuncinya riset ya. Itu profesor internasional. Dan juga itu *student body* ya, rasio antara mahasiswa asing dengan mahasiswa lokal gitu, rendah sekali ya, itu. Itu tantangan besar yang didorong dari sistem apa, perbaikan Dikdasmen sampai perguruan tinggi, saya kira ya.

Ini sebetulnya, ini inti-inti aja saya yang ingin saya terapkan ya, apa yang saya ingin ya sampaikan, ini dari perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan. Perubahan-perubahan yang akan dilakukan kalau ke depan ini dalam teori analisis kebijakan ini kita bangun analisa retrospektif dan prospektif ke depan.

Saya sangat menghargai, saya suka sekali materi dari Pak Didik itu. Itu analisis perspektif dari bagaimana kalau sekolah swasta dan sekolah negeri itu sama dituntut standar mutunya, tidak beda. Tapi pemenuhan kebutuhannya itu jauh berbeda ya, jauh berbeda. Tuntutan mutunya sama, sistem penjaminan mutu sama ya, kriteria-kriteria yang diberlakukan sama, tetapi perlakuannya tidak sama ya gitu. Jadi ini harus ada perubahan bagaimana keadilan ya diterapkan selain prestasi selain mutu gitu.

Saya kira karena waktu aja saya ingin berbicara lebih banyak hanya waktu aja Pak Dede ya.

Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullah.

KETUA RAPAT:

Kalau kata Pak Putra, wah ini apa transformatif banget ini, memotong waktu sekolah ya. Lama sekolah ALS cuman takutnya nanti kena undang-undang bekerja anak ya. *Nggak* boleh itu Pak kalau masih 15 tahun sudah mulai kerja, harus dicari yang 17 itu. Angkatan kerja usia berapa?

GURU BESAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UPI (Prof. Dr.H. NANANG FATAH, M.Pd.):

15 tahun ya, 15?

KETUA RAPAT:

Iya, cuma nanti yang itu apa mempekerjakan anak itu nanti repot juga *gak* apa-apa tapi kita kita tampung ya Pak ya, kita tampung. Sebagai ini saja tambahan sebelum Pak Fasli dulu kita pernah bikin Panja perguruan tinggi, beberapa rekomendasinya adalah salah satunya terkait sumber pendanaan PTS yang sangat terbatas maka diusulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu adanya keseimbangan dalam proporsionalitas anggaran negara APBN kepada PTS dan PTN dengan memperjelas peran dan tanggung jawab keduanya. Misalnya fokus PTS adalah tanggung jawab terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi peningkatan, peningkatan APK, sedangkan fokus PTN adalah peningkatan mutu pendidikan tinggi, artinya yang riset dan sebagainya itu..

GURU BESAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UPI (Prof. Dr.H. NANANG FATAH, M.Pd.):

Maaf ya, maaf saya potong Pak. Mengapa yang menyebabkan bermasalah Indonesia dibanding di Malaysia ya jauh ya? Maaf itu ada 4.100 perguruan tinggi di Indonesia, sedangkan Malaysia itu hanya 100 ya, itu yang itu yang harus dikendalikan. Izin pendirian PTS PTS juga kalau tidak layak, itu harus dikendalikan.

KETUA RAPAT:

Ya itu kalau bicara Singapura, Singapura *nggak* sampai se-ibukota Jakarta penduduknya. Jadi memang tidak *apple to apple* juga sih. Tapi kita harus cari bentuk ya, gitu.

Baik, berikutnya Pak Fasli. Ini dua orang ini sudah berapi-api tadi.

Mungkin Pak Fasli paling tidaklah pernah ada di dalam, jadi tahulah bagaimana pembiayaan, lebih berapi api.

Silakan Pak Fasli.

REKTOR UNIVERSITAS YARSI (PROF. DR. FASLI JALAL, Ph.D.):

Terima kasih.

**Pak Pak Ketua dan Pimpinan,
Serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Anggota Komisi X yang saya hormati dan
saya muliakan,**

Saya langsung saja tolong *slide*-nya ya. Jadi saya langsung berikut lanjut. *Nah* sebetulnya kita *kan* kenapa kita gelisah ya karena memang dalam berbagai indikator yang bisa dibanding-bandingkan, baik dibandingkan antara waktu di dalam negeri maupun antar negara sebagai indikator pendidikan yang dipakai umum, kita memang tertinggal. Dan kemudian dari akses kita masih punya masalah, dari keinginan untuk melegitkan beberapa perguruan tinggi kita menjadi *word class* juga belum terwujud dengan baik. Jadi karena itu sebetulnya apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ini.

Lanjut, kita tahu salah satu yang di lanjut, coba halo, ya lanjut lagi.

Nah saya sengaja mengulang-ulang ini, karena sekarang *human development index* tidak lagi dipakai ya, untuk dunia sekarang memakai *human capital index*. Karena di HDI itu dianggap eh pemasukan *income* per kapita itu tidak tepat, sebetulnya itu hasil akhir yang bisa mem-*proxy*-nya adalah kesehatan dan pendidikan. Karena itu oleh Bank Dunia IMF dan lain-lain diperkenalkan indeks baru yang namanya *human capital*, dimana tidak ada lagi indikator yang berhubungan dengan pendapatan per kapita.

Nah dalam lima indikator ini, yang berhubungan dengan sekolah itu dua harapan lama bersekolah, *expected years of schooling*, yang kita kalau wajib belajarNYA dengan sungguh-sungguh dilakukan agak lumayan kita. Tapi kita yang paling bermasalah adalah skor tes, skor, ya ini diambil dari tes skor PISA.

Nah di sini kita negara-negara tetangga kita sudah di atas 500 ya, Cina masih di bawah itu tapi sudah menuju ke 500, Vietnam pun kita lihat juga sekarang bergabung PITA dengan di atas 500, kita masih di bawah 400, di bawah 400.

Lanjut, kalau kita lihat akibatnya apa? Akibatnya potensi dari anak kita yang lahir sekarang untuk bisa produktif pada usia 18 tahun nanti itu hanya separuhnya. Jadi bangsa ini kehilangan *foregone income* yang kata Prof. Nanang tadi, hampir separo kalau kita tidak perbaiki kondisi yang dihadapi oleh anak-anak kita yang lahir saat ini.

Nah kemudian lanjut, kalau kita lihat tadi karena dipakai tes score, kita sudah ikut sejak tahun 2000 Pak Ketua, sekali 3 tahun kita ikut memang kita mem-*benchmark* kepada 32 negara maju ya OECD. Tapi di hampir 40 negara lain Malaysia, Thailand, Vietnam, beberapa negara Afrika, Amerika latin di luar anggota OECD itu juga ikut dan kita termasuk anggota peserta PISA ini yang paling konsisten ikut. Dan selama 20 tahun kita ikut, itu jangankan menaik, di tengah tadi 20% sudah direalisasikan tahun 2009, di tengah berbagai kemajuan infrastruktur ekonomi segala macam, tes skor kita itu malah menurun.

Kemarin terhempas oleh Covid, menurun lagi, walaupun secara relatif karena negara lain juga terhempas dan kita tidak sebesar mereka, jadi ranking kita menaik lima, lima skala. Tapi tes skor kita sebenarnya makin menurun.

Lanjut, *nah* karena itu, lanjut lagi ini karena waktu, lanjut lagi, *nah* lanjut lagi. Nanti ini sebagai pengantar *aja* lanjut lagi terus. Saya ingin menekankan kepada dialog kita saat ini coba yang, lanjut, lanjut aja dulu ya.

Nah tabel ini tabel tadi itu, *nah* tabel ini sengaja saya ulang lagi, ya sebenarnya Bapak-Bapak dan Ibu sangat paham, tapi saya ingin mengatakan bahwa pertama uang kita itu ada 665 triliun, itu uang yang besar, tapi saya analisa dari tabel ini saya tidak lagi di dalam, ada cara yang menurut saya perlu dibuat lebih transparan.

Kenapa di dalam anggaran yang disahkan 20% karena itu mandatori dari konstitusi dipakai seakan-akan dana cadangan. Pertama 47 triliun, 47 triliun dipakai seakan-akan tidak dialokasikan anggaran APBN harusnya dialokasikan untuk program, ini disimpan saja disimpan saja 47 triliun. Dan angka ini naik dari hanya 2,8 triliun tahun sebelumnya, melompat raksasa.

Pada saat kita perlu dana untuk perguruan tinggi, untuk KT, untuk wajib belajar untuk menaikkan. Apa tadi itu PISA tes skor PISA itu dan yang lebih berat lagi di bagian bawah, di pengeluaran pembiayaan, di samping sebetulnya dana ini sudah ada cadangan, yaitu walaupun nanti kita menjanjikan akan membayar kepada apa untuk LPDP 15, kemudian untuk kebudayaan 5, 4 dan untuk riset dan seterusnya, itu pun sebenarnya sudah dana cadangan. Karena kalau nanti pendapatan tidak memenuhi persyaratan tidak sesuai dengan yang diharapkan ini bisa ditahan, jadi tidak diberikan.

Jadi sebetulnya ini sudah dana cadangan, tapi ditambah lagi 50, 52 triliun, kosong. Jadi hampir 100 triliun Pak Dede dan ini kita biarkan. Padahal kalau kita ambil separuh ini saja, ini luar biasa dampaknya, isu UKT bisa terselesaikan, wajib belajar bisa kita selesaikan, akses *mock* tadi ya, masif *open lend course* tadi itu. Tapi kenapa ini dibiarkan gitu dan saya sebagai orang pendidikan yang sudah dituduh, mana tuh hasil dari 20% anda. Setiap hari kita berjalan ke mana-mana saya kan tentu termasuk Komisi X juga ya. Karena mereka *kan gak* tahu *nih*, tapi ya di tengah kita, kita biarkan 100 triliun dicadangkan. Sebenarnya dalam, saya lama di Bappenas tidak boleh ada dana kecuali dulu waktu waktu bencana aja. Jadi BUN, BUN itu dulu hanya untuk bencana tapi begitu ada BNPB udah dimulai dialokasikan hanya keadaan keadaan *force majeure* saja dana itu dikeluarkan.

Nah yang lain-lain itu kalau *nggak* pendapatan *nggak* cukup diadakan realokasi dengan APNBP, apalagi di kita ini sudah ada nih 25 triliun yang kalau nanti pendapatan tidak masuk, kita *nggak* usah berikan.

Karena itu hanya menambah kepada *endowment* yang sebetulnya jauh lebih penting menyelamatkan yang ada ini dulu dari membantu *endowment*. Jadi *endowment* pun sebetulnya sudah merupakan ruang gerak. Tapi kenapa 100 triliun ini masih ditahan?

Yang kedua, saya betul-betul apa ya berpikir lama mengenai 52% untuk daerah ini. Jadi kalau asumsinya kita berikan otonomi penuh, kita berikan biaya

penuh, kita berikan kemampuan *me-manage* semua, memilih kepala dinas, memilih guru, kepala sekolah segala macam.

Oke sudah kita berikan, tapi apa hasil dari kepercayaan mandat dan dana yang besar itu? Siapa yang mengejar KPI dari pada kepala daerah, siapa? Padahal 52% itu di tangan mereka. Kalau memang kemampuan mereka merencanakan kurang tepat atau menu-menu mana program yang efektif yang terbukti efektif dan efisien yang bisa dia pakai, sebetulnya pekerjaan untuk mempertajam itu tidak terlalu rumit sebetulnya.

Saya pernah menjadi fasilitator, diminta BKKBN menggunakan forum rektor 288 perguruan tinggi kita bagi mendampingi 314 kabupaten/kota untuk mampu mereka merencanakan program *stunting*. Dan ternyata bisa, kita punya LPTK, kita punya fakultas ilmu pendidikan di seluruh Indonesia.

Saya kira kalau dibagi habis terutama untuk kabupaten kota yang memang agak bermasalah didampingi perencanaannya, dilihat bagaimana program-program yang efektif dan efisien masuk dalam perencanaan, dilihat kelembagaannya, dilihat kapasitas SDM-nya, dimonitor implementasinya, dilihat hasil sekarang dengan asesmen kinerja murid. Itu sudah bisa kita ketahui per tahun, delta dari kemajuan murid sekolah kabupaten/kota sampai provinsi sampai nasional. Jadi kita *ndak* perlu mencari lagi indikator-indikator yang sulit. Faktual, *evidence base*. Jadi karena itu, tiga pesan saya.

Pertama, untuk memastikan bahwa anggaran yang 20% ini yang di mata masyarakat banyak pertanggungjawabannya adalah kita-kita yang berhubungan dengan pendidikan ini, maka tiga hal ini perlu kita rapikan.

Pertama 100 triliun ya. Dua, dua komponen dari 100 triliun. Dan yang kedua, bagaimana kita bersama daerah, karena ini tujuan daerah untuk membuat masyarakatnya maju, terdidik dan produktif.

Nah kemudian karena itulah Bapak dan Ibu langsung saja kepada apa berikutnya supaya waktu kita bisa diskusi nanti.

Lanjut lagi, saya melihat sedikit mengenai proporsi mengenai jenjang pendidikan. Lanjut, jadi kalau *best practice* yang dikumpulkan dari berbagai studi memang 20 sampai 25% anggaran itu di pendidikan tinggi. Kemudian ya, tergantung juga level dari kemajuan negara tersebut. Kira-kira 38 sampai bisa sampai 40% itu di pendidikan menengah, tapi yang wajib belajar karena kita milih sampai SMP itu memang bagian terbesar, yang wajar ya. Dan yang belum kita kerjakan dengan baik adalah PAUD, PAUD ini sangat sedikit padahal *benchmark*-nya sekitar 10% adalah untuk pendidikan anak usia dini.

Nah saya kira proporsi ini tidak jelas sekarang Pak Dede, karena sudah terbagi-bagi gitu dan kita tidak bisa *men-trace* lagi, bagaimana kelayakan antara proporsi ini, baik secara nasional maupun pada waktu dana yang diberikan kepada daerah. Betulkah mereka sudah mengamankan proporsi ini sesuai dengan kondisi spesifik di kabupaten kota dan provinsi masing masing?

Jadi di sini tadi, studi-studi yang disampaikan oleh Prof. Didik dan Prof. Nanang, saya kira sangat penting untuk Komisi X untuk membuat argumen yang saya kira ini perlu juga diketahui masyarakat banyak. Supaya jangan Komisi X aja yang bertempur ya. Yang saya lihat, karena ini ada badan anggaran ada lagi fraksi dan seterusnya ya. Padahal ini semua merasa negara ini sudah melakukan yang baik untuk pendidikan dengan menyediakan 20% tapi kenapa hasilnya 20 tahun tidak berubah-ubah untuk indikator yang bisa di nilai secara faktual.

Lanjut, *nah* ini yang kadang-kadang kita lupa walaupun kita sudah merasa bangga dengan 20%, tapi kalau kita lihat total pengeluaran Indonesia untuk pendidikan dari GDP, kita masih berada di antara tiga malam bisa turun ya, pada tahun 2022. *Alhamdulillah* dengan 2023 agak naik dan 2024 lumayan besar naik. Ini angkanya mungkin sudah melewati 3%, ini data yang sudah disusun oleh Bank Dunia ya. Tapi pertanyaan saya kalau misalnya negara-negara lain.

Slide, mereka memang sudah mengalokasikannya antara 4 sampai 6% dari GDP 4, 6% sementara kita masih 3% mungkin di bawah itu. Jadi kalau ini orang selalu menuduh kita, seakan-akan memboroskan uang negara yang didapat dengan pajak rakyat, itu sebetulnya *best practice* dunia, kita masih di bawah masih ada ruang gerak yang cukup besar, tinggal lagi akuntabilitas dan transparansi.

Nah saya tanya berbagai peneliti-peneliti mengenai studi *financing* di Indonesia, itu mereka pusing, cara menghitung anggaran Indonesia ini paling *pabaliut* kata orang, *nggak* jelas gitu. Di mendadak, di Kementerian Sosial 12 triliun gitu. Kejarnya apa ini? Beasiswa kok, beasiswa *double counting* ini?

Ini sudah ada beasiswa KIP ternyata uang *cash* yang diberikan kepada keluarga yang anaknya sekolah. Nanti saya takut lama-lama banyak definisi untuk 20% itu dipakai, apa aja masukin kait-kaitkan dengan pendidikan. Kemiskinan yang orang miskin yang bersekolah anaknya kasih kemiskinannya, jadi nanti 20% ini bisa ke mana-mana Pak Dede.

Jadi saya kira kalau *ndak* dirapihkan tidak kembali kepada kenapa dulu amandemen keempat itu dilakukan. Memang dengan visi sekolah pendidikan, ya dari bawah sampai pendidikan tinggi dan tidak memasukin yang lain-lain, malah pendidikan kedinasan pun sudah dari awal tidak dimasukkan. Jadi karena itu saya melihat dalam dialog kita, kalau saya sajikan sedikit lagi sebagai penutup apa yang terjadi di daerah, ini berdasarkan studi. Ya coba langsung teman-teman kepada ini, *slide* yang, terus, terus, terus, terus, terus, nanti *slide*-nya saya tinggalkan. Terus, karena waktu, terus, *nah* ini sedikit balik dulu untuk memperkuat lagi apa yang disampaikan Prof. Nanang dan Prof Didi.

Jadi sebenarnya oleh Dikti kan sudah diukur dan internasional juga sudah menghitung, sebetulnya dari total keseluruhan per kapita yang dibutuhkan untuk perguruan tinggi ini, per mahasiswa memang di kita tuh yang cukup rendah lah ya dibandingkan India. Bayangkan India dengan 1,4 miliar

penduduknya dia masih mengeluarkan lebih tinggi per kapita. Malaysia lebih dari 2 kali lipat kita, belum lagi kalau kita menuju pada lain. Kalau Singapura sudah 10 kali lipat lebih ya. Jadi kalau memang *student body* kita yang ada. Belum lagi untuk APK yang lebih tinggi.

Lanjut, memang ya sederhananya saja kalau mau eh apa, *you get what you pay* kata orang ya, apa yang kita bayar itu, jadi sebetulnya 110 triliun itu minimal. Kalau misalnya tadi *benchmark* di internasional pendidikan tinggi itu 1% Pak, 1% dari total GDP. Jadi kalau kita tadi anggap anggap 1% di GDP kita yang sekarang mungkin sudah 100 sekian. Jadi kita memang membutuhkan minimal lebih dari 110 triliun ini.

Sekarang kita tahu dari analisa Bapak dan Ibu kan betapa kecilnya sebetulnya padahal kita mau mengejar *word class*, mengejar R&D yang kuat, konten lokal yang lebih baik, membuat hilirisasi dari kekayaan alam segala macam. Itu menjadi *non sense*, kalau pendidikan tingginya *nggak* kuat dan yang kuat hanya yang mampu mengembangkan inovasi, kreativitas dan didukung dengan riset yang bermutu.

Nah terakhir, terus, terus, terus, terus, ini *ndak*, *ndak* saya sajikan saja, ini, *nah* ini, ini contoh. Jadi sekarang kita sudah bersyukur ya bahwa 20% tuh sudah direalisasikan ya, tapi kita lihat dulu waktu studi dilakukan Bank Dunia masih 60% dari dana itu di daerah. Ini harus kita *plototin* benar Pak, Pak Ketua, lanjut kemudian kita tahu bahwa desentralisasi ini sudah menjadi *rule of the game*.

Siap lanjut, kemudian peran Pemda dengan sendirinya menguat. Lanjut, *nah* bagaimana cara daerah dimonitor ya? Kita tahu bahwa sumber anggaran ini saya kira Komisi X sebagai yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan konstitusi yang mudah-mudahan satu sistem pendidikan nasional itu makin terealisasi. Boleh ada beberapa pelaku tapi kontrolnya adalah oleh Komisi X. Standarisasi, unit cost, bagaimana *best practice* tentang program yang efektif yang sudah terbukti. Itu menu-menu itu wajib dijaga di mana pun dilakukan termasuk pendidikan kedinasan tersebut.

Jadi kalau kita lihat ke daerah, lanjut, bagaimana caranya daerah menggunakan anggaran saat ini, lanjut. Kita lihat contoh misalnya, kita sering merencanakan kuantitas, apa kan. Jadi disiapkan bukunya, pustakanya ruangnya segala macam, tapi kehidupan membaca aktivitas di sana kurang. Jadi bagaimana agar kuantitas yang *input base* menjadi kualitas yang *output base* ya.

Kemudian kalau kita lihat lagi program-program yang ada di daerah, lanjut, lanjut, terus, terus, terus, terus, ini karena terlewat, *ndak papa lah*.

Jadi ini fakta juga, pada tahun 2022 dilakukan secara detail oleh Bank Dunia, 22% dari 500 waktu itu, 508 baru, itu mereka 22% tu tidak mencapai konstitusi, tidak melaksanakan konstitusi.

Kalau presiden bisa di-*impeache* kalau tidak melaksanakan konstitusi, apa, apakah kepala daerah tidak di-*impeach* kalau tidak melaksanakan konstitusi? Kenapa kita damai-damai aja dengan fakta ini? Padahal pada akhirnya Komisi X juga akan diminta dan 52% tadi di tangan Komisi X perencanaannya, transparansinya, monitoring-nya dan pengawasannya.

Nah karena itu kalau kita lihat lagi di daerah, lanjut 70% dari anggaran itu yang sudah kombinasi dari penyaluran dari 52%, tambah kewajiban mereka memberikan 20% dari APBD, di sini kadang-kadang *double counting* itu masih menjadi *debatable*. Tapi ternyata yang dibelanjakan hanya 30% yang bisa dieksekusi, 30% disimpan mungkin *ndak* dibelanjakan mungkin *ndak* selesai tapi ini menjadi sisa anggaran yang nanti wajah pendidikannya *ndak* jelas lagi bisa dipakai untuk macam-macam.

Nah kalau praktik ini menjadi bagian oleh daerah, saya kira menjerit-jeritlah kita di pusat ini, tidak akan membantu. Jadi sarannya apa? Saran, lanjut kepada bagian paling bawah ya.

Terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, *nah* sebentar, jadi saya bacakan aja lah ya. Jadi kalau kita lihat dari yang kita perlu lakukan direkomendasi, itu pertama adalah peninjauan kembali kapasitas pemerintah daerah dalam mengeksekusi, merencanakan, memprogramkan, mengeksekusi dan akuntabilitas dengan KPI yang jelas.

Yang kedua, program-program yang efektif, yang saat ini fisik versus proses pembelajaran. Saya pernah melakukan studi untuk apa US ID untuk *outside*, itu ternyata waktu kita kejar mutu itu disebut berkali-kali dalam dokumen renstra daerah, RPJMD segala macam waktu kita kejar.

Apa dana yang dimasukkan ke dalam mutu, itu hanya 1,2% dari anggaran pendidikan yang sudah terbatas? Jadi mutu itu selalu lebih sering dia kantor, mutunya pagar, rehab, fisik-fisik, kadang-kadang buku, buku kadang-kadang belum tentu juga termanfaatkan. Tapi yang mendukung guru melaksanakan proses belajar mengajar *peer group* mereka berbagi, melakukan refleksi 1,5% dari total anggaran pendidikan yang sudah sedikit di daerah itu.

Jadi karena itu kita bisa membuat menu-menu nasional, paksakan daerah dan kemudian tentu lokal konteksnya harus di disesuaikan. Kemudian perlunya penyederhanaan standar ya dan klasifikasi anggaran sehingga mudah dimonitor.

Di sini digitalisasi menjadi bisa dimanfaatkan ya, teknologi bisa dimanfaatkan dan kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan sebagai kesimpulan, saya merasa bahwa satu kita berharap agar 20% itu harus transparan, harus jelas dan dialokasikan dijelas kepada kementerian mana. Terutama yang kita harapkan tentu pelaku utamanya ini dan dalam satu pintu karena dia mendukung sistem pembangunan nasional, tidak, tidak boleh harusnya ada tabungan-tabungan, *buffer-buffer*, tapi diatasnamakan 20% anggaran pendidikan.

Dan kemudian karena 52% diberikan ke daerah, harusnya kita, harus bersama-sama dengan daerah, rajin mendampingi, mengingatkan, memberi insentif dan disinsentif sesuai dengan kinerja mereka, agar 52% itu sesuai dengan Undang-Undang Otonomi, melahirkan fungsi wajib mereka, pendidikan dalam fungsi wajib dengan KPI yang harus jelas.

Sekarang sudah ada jelas hasil belajar sebagai bagian yang penting bukan lagi input-input, tapi kejar mereka untuk hasil belajar. *Nah* dalam proses itu kita libatkan semua *stakeholders* untuk bahu-membahu. Mudah-mudahan kalau ini kita lakukan Pak Dedi, saya kira kita *ndak* yakin orang Indonesia akan sebodoh yang tergambar dari hasil PISA skor sekarang ini.

Kita yakin kalau anak-anak kita diberikan kesempatan, dia belajar di luar, dia *straight A* dia menjadi orang-orang masuk apa organisasi yang *straight A* itu apa apa LAMDA, KAPA atau apa itu. Saya lihat anak-anak kita sangat respectif dan sebetulnya sangat mampu, tinggal lagi kita bisakah kita memberikan dukungan pada mereka.

Dan *insyaallah* Komisi X saya kira dalam posisi terbaik untuk mengejar terus-menerus agar bangsa ini disadarkan bahwa 20% itu adalah panggilan moral, cita-cita ideal, tapi kalau tidak kita kawal dengan baik, semua kita akan mendapatkan apa, apalah harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan yang Maha Kuasa.

Sekian terima kasih.

*Wa billahi taufik walhidayah,
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Fasli Jalal.

Kita ini ngeri kalau melihat presentasi beliau-beliau ini ternyata pendidikan kita nih baru berdampak kurang lebih hanya di 52% produktivitas. Jadi kita-kita yang duduk di sini *nih* rata-rata baru 52% kemampuan produktivitasnya. Ini harus kita rubah.

Kita termaksud itu, maksudnya kalau misalnya dulu kita sekolahnya benar mungkin Pak Ferdi sudah jadi wakil presiden sekarang. PAUD saya pikir juga harus menjadi catatan penting karena selama ini kita kurang memikirkan masalah PAUD ya.

Kebijakan 20% saya perlu klarifikasi sedikit Pak Fasli, Pak Didik dan apa Pak Nanang, karena ini kan ditonton YouTube juga ya. permasalahannya adalah yang dikelola di Komisi X adalah yang *given*.

Jadi kita tidak pernah berbicara 20% itu ke mana aja. Kami pun baru tahu ada 100T yang ada di BA BUN dan di Non K/L artinya di Kementerian Keuangan ya, ada 47 triliun, 52 triliun, *plus* di Kemensos ada 12 triliun pula. Itu tidak pernah dibicarakan di sini, sehingga jangan sampai nanti kami dikira kamilah yang mengatur itu.

Mengenai anggaran pendidikan, memang betul itu kita hanya *given* di sini dikasih 90 atau 83, kita hanya merumuskan. Peran Pemda saya pikir ini perlu jadi catatan penting ya selama ini kurang ya.

Baik kawan-kawan masih ada waktu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam ke depan kita diskusi. Kita mulai dari Pak Putra, Pak Ferdi.

Silakan dimulai dari itu dulu.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Profesor Dede, kalau di Dapil kita semua Profesor Prof.

Para narasumber, Prof. Didi, Prof. Nanang, Prof. Fasli,

Saya tadi menyampaikan saya temannya Prof karena sejak reporter saya paling senang wawancara guru besar, karena kalau setelah wawancara guru besar tuh apa ya tercerahkan. Setelah itu kita menulis beritanya juga dengan semangat dan kadang-kadang kita bingung sendiri gitu ya. Kalau sama kalau sama pejabat, birokrat itu langsung-langsung saja gitu kan ya, *to the point*. Tapi saya berterima kasih, berterima kasih kenapa? Karena di sini kombinasi tiga profesor yang bukan hanya bicara tentang politik pendidikan, tapi juga saya kebetulan pengikut apa namanya, apa yang disampaikan Prof. Nanang tadi, sekolah jangan lama-lama, kerjanya yang lebih lama.

Saya kebetulan jadi reporter dari sejak umur 20 tahun, jadi sudah jadi wartawan profesional kerja terus ya jadi makanya waktu sekolah juga *nggak* terlalu serius kerjanya serius, jadi pilihannya itu. Tentunya ini menjadi catatan kita, terutama kalau kita bicara politik pendidikan. Saya rasa saya ambil poinnya saja, tidak usah mengelaborasi terlalu banyak, karena catatan saya terhadap apa yang disampaikan tiga Prof. ini sudah berlembar lembar. Yang paling penting adalah *output* dari Panja Biaya Pendidikan ini gitu ya. Artinya banyak sekali pesan yang disampaikan oleh tiga narasumber ini terkait dengan sikap Komisi X.

Bagaimana Panja ini merumuskan fakta-fakta yang selama ini sudah kita saksikan dan diberberkan oleh ketiga narasumber ini, termasuk tadi yang Prof. Fasli menyampaikan, terkait dengan ada dana di Bendahara Umum Negara dan juga ada dana lain yang ternyata tidak pernah dianggarkan selama 4 tahun terakhir tapi di dianggarkan 52 sekian triliun sekian yang tidak digunakan.

Dan juga yang menjadi *concern* kita tentunya yang sangat dalam adalah terkait dengan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa). Saya juga cek ke beberapa teman di Kemendagri, itu juga mereka tidak ada pelaporan yang jelas dan lain sebagainya, terkait dengan apa yang telah digunakan dengan dana yang jumlahnya besar sekali. Yang tiap tahun kita, kita transfer ke daerah itu sebesar 350 sekian triliun, gitu ya.

Jadi jadi ini ini ini menarik, Bapak-Bapak narasumber waktu kita melakukan kunjungan kerja ke salah satu negara yang punya pendidikan kualitas pendidikan dan sistem pendidikan sangat baik seperti Finland. Mereka mengatakan bahwa sembilan partai politik yang ada di sana, baik itu kanan jauh, kiri jauh yang moderat, mereka itu semua bersatu hanya di bawah satu bendera, yakni pendidikan.

Saya sempat terpukau, tapi *nggak* lama karena saya juga ingat apa yang disampaikan tadi Prof. Didik, kita juga tahun 2000 2000 sekian juga bersatu, pendidikan 20%. Kita sama sepakat semuanya, bahkan itu sudah masuk dalam konstitusi, konstitusi negara kita 20%. Yang jadi masalah kan akhirnya adalah yang tadi, kita tidak transparan, kita *ngejelimet* dan kita tidak memberikan sepenuhnya 20% itu untuk rakyat Indonesia.

Nah ini yang kalau menurut saya, saya sepakat pimpinan, kita di akhir masa jabatan kita sebagai anggota dewan di tahun 2024 ini, kita juga jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terang benderang.

Saya paling senang kalau ngomong sama Almarhum yang saya hormati sebagai seorang narasumber Nur Kholis Majid ya. Saya sering wawancara beliau, kalau bicara itu terang benderang, jelas gitu ya.

Menurut saya juga Panja komisi, Panja Pendidikan, kita ini Biaya Pendidikan ini dalam rekomendasinya nanti juga harus jelas. Harus jelas dan harus terang, bahkan ditantang tadi sama Prof. Fasli, bagaimana kita bisa membuat satu argumen yang bisa dipahami oleh masyarakat dan bahkan menggerakkan komisi-komisi lain, menggerakkan fraksi-fraksi lain bahwa kita satu, sepakat, ya.

Kalau tadi saya bilang saya ingatkan sama Pak Fahmi bahwa salah satu koran berbahasa Inggris di Indonesia ini, Jakarta Post selalu menggunakan istilah anggota DPR itu *law maker*, pembuat undang-undang, *nggak* pernah mereka bilang *member of parlemen*, *nggak* pernah, selalu mereka tulis *law maker*, kitalah pembuat undang-undang itu ya. Ini adalah produk kita yang pada kenyataannya. Tidak perlu sebenarnya tiga Prof ini menggarisbawahi lagi. Kita sudah tahu, gitu ya. Kemana larinya, siapa yang menggunakan, kenapa tidak efektif dan efisien? Kita sebenarnya sudah, sudah banyak tahu, meskipun tadi ada beberapa detail yang disampaikan. Ini menurut saya yang harus apa namanya?

Pimpinan dan teman-teman Anggota Panja lainnya,

Ini yang harus menjadi satu produk dari Panja kita ini untuk mengantarkan kepada periode berikutnya, gitu ya. Jadi ini sekali lagi terima kasih kepada Prof. Didik, Prof. Nanang dan Prof. Fasli, ya ini luar biasa *eye opener* ya dan juga mengingatkan kembali pada kita bagaimana pendidikan itu yang akan mengantarkan Indonesia ya, menjadi kalau, kalau, dibandingkan sama Singapura tuh saya *ngenes* terus ya. Kalau dibandingkan sama Singapura ya selalu apa namanya, data-datanya ya disandingkan itu membuat membuat kita tuh terenyuh.

Banyak sekali teman saya waktu jadi wartawan diplomat-diplomat Singapura bercerita kepada saya, saya tanya kok kalian kok rajin ya ketemu sama orang-orang? Mereka bilang, Pak Putra, waktu itu saya pimpin redaksi Pak Putra, kami rajin karena kami negara kecil, jadi harus kami yang lebih daripada negara lain. Dan yang kedua kami harus segera mengetahui semua masalah yang di Indonesia sudah kami alami semuanya dan kami sudah tahu jawabannya. Kami harus riset untuk mengetahui *what would be the next challenge*, tantangan berikutnya apa, mereka sampai kayak gitu, gitu ya. Jadi semua problematika yang ada di Indonesia mereka sudah lewatin mereka sudah tahu jalannya, jalan keluarnya. Solusinya, sekarang tugas mereka tantangan mereka adalah mencari kemungkinan tantangan berikutnya apa.

Nah ini, ini adalah kesempatan bagus sekali Pimpinan buat kita yang ada di Panja Pendidikan untuk betul-betul memberikan semacam apa ya, argumentasi yang sangat kuat ya, tendangan yang sangat kuat ya, pukulan terakhir gitu kan ya, untuk dari Komisi kita ya, untuk bisa menggugah kita-kita yang ada di DPR semuanya dan pemerintah khususnya dan pemerintah daerah. Yang selalu saya juga mempertanyakan komitmen 20%-nya betul-betul *nggak*? 20% pendidikan dan siapa yang mengawasi ya? Agar kita tahu bahwa kita pernah sepakat dan sampai sekarang masih sepakat terhadap 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Saya rasa itu Pimpinan yang bisa sampaikan.

Terima kasih kepada tiga narasumber yang sangat inspiratif.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Merdeka.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Putra.

Berikutnya Kang Ferdi.

F-GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Terma kasih Pak Dede.

Terima kasih.

**Para narasumber,
Kang Nanang Fatah, Uda Fasli Jalal dan Mas Didi Rachbini,**

Saya langsung saja, ada beberapa catatan semua saling terkait cuma kalau sebelum bicara keluar kita bicara internal, artinya Bapak-Bapak ini kita anggap lingkungan internal, bukan eksternal. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan belum bicara keluar, berapa sih yang anggaran fungsi pendidikan itu? Tapi bukan itu yang kami maksud nanti di antaranya adalah kita fokus dengan anggaran yang ada di Kemendikbud karena mitra kami kan Kemendikbud. Sebelum kita bicara keluar, di internal dulu diberesin.

Nah, oleh karena itu, dasar itulah pemikiran kami, ada beberapa yang perlu kami klarifikasi dan mohon masukan dan juga mohon jawaban. Diantaranya sederhana misalnya skor PISA, kan sudah tahu hasil PISA. Hasil rekomendasi PISA dan rekomendasi OECD sudah tahu. Cuma problemnya menurut Bapak-Bapak nih apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Kalau tadi penyimak penjelasan dari Pak Fasli, Pak Nanang dan Pak Didik sekilas, kayaknya kita juga belum melakukan apa yang direkomendasikan oleh PISA dengan baik dan benar, maupun juga OECD. *Nah* oleh karena itu, sudi kiranya skor yang direkomendasi PISA dan OECD mana yang belum dan mana yang sudah, itu yang pertama.

Oleh karena itu, kita optimalkan saja anggaran Kemendikbudristek dengan yang ada, misalkan dengan asumsi 90,1 triliun menggunakan anggaran yang sudah itu apa yang bisa diperbuat? Artinya ketika kita menyajikan ini, menyatakan kurang, sudah *firm* nih di dalam Pak, sudah sudah tidak ada kegamangan. Ini yang kita butuhkan minimal kan gitu, karena nanti menyangkut juga biaya-biaya yang mungkin tidak termasuk yang dikelola Kemendikbudristek, karena kita mitranya Kemendikbudristek. Betul ini menyangkut juga anggaran fungsi pendidikan yang lain, tapi saya lebih senang kalau kita fokus dulu, anggaran yang di Kemendikbudristek, itu bisa apa minimal dilakukan?

Masalahnya, *nah* ini mohon maaf ini kejadian yang kerap kali dikasih misalnya waktu itu 78 triliun tercapai target dikasih 80 triliun tercapai target dikasih berapapun target tercapai. Ya kita jadi mikir Pak, ya udah kalau gitu *nggak* usah ditambahin juga tercapai target, baik yang ditugaskan oleh program prioritas nasional maupun program prioritas kementerian dan lembaga. Jadi kita pun jadi Komisi X bingung, *nah* apa yang mau kita jual kalau semua nya targetnya tercapai. *Nah* ini targetnya kerendahan atau memang dicapai-capaian jadi pertanyaan kan.

Nah dengan kata lain tadi saya setuju mungkin tersirat di Pak Fasli, tersirat di Pak Didi tapi tertegaskan oleh Pak Nanang, berani *nggak* mengatakan kalau saya *nggak* memegang anggaran Kemedikbudristek? Kembali lagi, Nadiem Makarim ada keberanian itu *nggak* waktu itu?

Saya bilang walaupun *not to be late* sekarang bisa sebagai *legacy* anggaran pendidikan kalau tidak megang 250 triliun set set gagal, tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan gitu, harus berani, *problem*-nya *nggak* ada keberanian saudara Nadiem Makarim.

Nah yang ketiga cara dan metode perencanaan serta implementasi penganggaran yang saat ini terjadi. Hal apa yang minimal kita bisa lakukan. *Problem*nya kan gini, *nah* ini Pak Fasli ketika diutarakan katanya trilateral antara Kemenkeu, Bappenas dan Kemendikbud kok *nggak* bisa diterima di lingkungan internal? Ini kan baru bicara internal pemerintah, pagu indikatif keterangan bicara 2025, 83,1 triliun, kan jadi pertanyaan bagi kita. Loh kok kamu di internal pemerintah *nggak* bisa menyakinkan? Kenapa? Dari 98 *gedrop* alasannya *baseline* lah. Saya transisi apa pemerintahan dan sebagainya itu kan *nggak*, *nggak make sense* dengan argumentasi kita dalam rangka melaksanakan perintah konstitusi kita. Itu yang ketiga.

Nah yang keempat, masalah yang perlu juga diketahui bahwa program dan kegiatan Kemendikbudristek di Komisi X, hampir saya pastikan termasuk saya yang terlama. Kita tidak tahu Pak, jadi gimana kita mau dukung? *Nggak* diinfokan, *nggak* dilibatkan. *I am say to sorry*, loh iya kan? Tidak dilibatkan, tidak diinfokan. Ya pun, *punten* Pak Nanang. *Abdi moal tiasa ngarajong*. Kan gitu. Itu masalah Pak Didik.

Jadi, *nah* ini juga sebagian besar kebijakan terutama kebijakan misalnya MBKM secara, liat heboh dulu baru diajak, ya awal pelibatan pemangku kepentingan yang notabene katanya kita mitra Komisi X *nggak* dilibatkan. Ya berarti komunikasi macet. Bahkan intensitas komisasi, intensitas komunikasi, sangat-sangat minim ya.

Yang kelima, *nah* tadi menarik juga. Ini belum belum, belum klop nih Pak Fasli, Pak Didi dan Pak Nanang, pemahaman tadi Pak Fasli mengatakan bisa bisa ke mana-mana nanti anggaran fungsi pendidikan sekarang. Nanti 23 kali nanti jadi 40 K/L, kan gitu ya. Karena apa? Pemahaman-pemahaman, definisi ruang lingkup anggaran fungsi pendidikan belum *confirm*. Belum *confirm* dalam artian diteken bareng-bareng seluruh pemangku kepentingan, sehingga itu bisa dirigid dan dirinci lebih lanjut.

Yang keenam kaitan dengan penganggaran. Kita terpaksa bahasanya kita terpaksa *function follow money* bukan *money follow function*, ya kan dalam penganggaran kan gitu, akhirnya apa? Duit yang tersedia apa yang bisa kita lakukan, bukan kita butuh ya misalnya 260 triliun, maka kalau tidak ada 260 triliun *nggak* bisa jalan bukan begitu. Jadi dibalik duit ada berapa kita ngikut. Jadi kayak EO nih Pak kita, iya kalau EO kan ditanya Bapak mau, Bapak mau nikah kan? Iya, budetnya berapa? Begitu Pak, bukan kebutuhan yang ditampilkan, tapi bapak punya duit berapa? Jadi pola pikirnya berbeda.

Yang ketujuh digitalisasi. Katanya konon diagung-agungkan ternyata juga banyak pemangku kepentingan dan masyarakat. Lucu Pak mengambil data mendapatkan informasi bukan dari lamannya Kemendikbud, juga menjadi kritik kita bersama. Lucu kan?

Nah, harusnya kan katakan misalnya saya mencontoh waktu itu *enjustment gate*-nya Pak Dede kenapa lebih baik. Padahal Pak Dede pakai APBDY (Anggaran Penerimaan dan Belanja Dede Yusuf). Ini Pak pakai APBN tapi *engagement rate*-nya kalah dengan Dede Yusuf, kan lucu? Jadi setiap postingan yang *like* dan komen jauh lebih sedikit apa yang ditampilkan oleh Dede Yusuf, kan lucu. Itu yang jadi kritik kita juga bersama ya. Oh ya? Tapi kan APBDY kan? Anggaran Penerimaan Dan Belanja Dede Yusuf. Yang ke?

Jadi apa ketujuh tadi, saya mau dalam adalah yang juga menarik katanya digitalisasi Dede. Konteks digitalisasi dengan akses juga *nggak* simultan Pak, tidak linear, mengagung-agungkan digilititasisasi, tapi tidak benar atau bahasa yang agak halus tidak sangat optimal melakukan pemetaan berapa sekolah yang signalnya bagus, dengan baik berapa sekolah yang signalnya masih yang jelek sama sekali. Berapa sekolah yang *nggak* ada pagar, sehingga kalau di-*drop* komputer di situ pasti akan hilang. *Nggak* punya, *nggak* punya data-data kayak gitu. Akhirnya ya kesannya mubazir. Dan yang paling penting belum berbudaya IT Pak, karena masih banyak pelaku dalam dunia pendidikan ketika dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan, dengan cepat dia tidak melakukan komputer itu dengan *shutdown*, tapi menarik kabel *power*-nya, wah rusak. Itu kan budaya IT. Gimana belum berbudaya IT, tapi sudah caranya akan dibagi-bagikan.

Yang kedelapan, bagaimana pendapat Bapak nih Pak? *Nah kan* lagi seru-serunya, di akhirnya kita juga mau evaluasi MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Merdeka sekali dalam, dalam pendidikan, baik itu secara filosofi karena kita anggap kan Bapak-Bapak lebih lebih implementatif dan ngerti filosofinya. Karena mengenai filosofinya, dasar hukum dan implementasi sehubungan dengan pembiayaan pendidikan. Ini memakan banyak biaya dan Nadiem Makirim pun waktu itu, saya tanya, berani *nggak*, Saudara Nadiem Makarim sebagai Mendikbud menyatakan apabila MBKM saya tidak dikasih 90 triliun macet programnya? *Nggak* berani, justru *nggak* ada, itu *nggak* ada keberanian. Mau bikin suatu terobosan tapi tidak ada keberanian mengungkapkan anggaran tersebut berapa sesungguhnya diperlukan. Kalau *nggak* dikasih 90 MBKM, misalnya 90 triliun, MBKM akan macet, *nggak* berani juga.

Yang kesembilan, perlu pemisahan biaya langsung. *Nah* tadi sudah di paparan, *nah* saya mau izin bertanya juga Pak yang ada di lingkungan. Kalau meja di Kemendikbud dianggap anggaran pendidikan *nggak*? Meja tulis kan tidak biaya langsung kan? Tidak langsung berhubungan dengan pendidikan?

SALAH SATU PAKAR PENDIDIKAN:

Indirect.

f

F-GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Indirect kan? Indirect, paham. Indirect cost dan direct cost, berarti itu dihitung nggak? Kalau itu nggak dihitung harusnya, nggak dihitung di luar anggaran fungsi pendidikan. Nggak semua dihitung, termasuk juga nanti ke sekolah kan? Macam-macam itu jadi ini juga perlu juga tadi, kaitan dengan biaya personal non personal dan operasional ada tiga. Tapi investasi kita geser dulu Pak investasi karena tidak berhubungan langsung dengan yang ada di Mitra kami kita kiri geser aja itu urusannya kementerian lain.

Terakhir manfaat anggaran fungsi pendidikan ini Pak, Pak Didik, Pak. Jadi kami juga mohon nanti Pak Didik bisa men-*trigger* 665 triliun ini kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berapa? Baru orang ekonom, oke, 665 triliun membuat *trigger*, kontribusinya 1,4%, pasti investor taruh duit ke pendidikan. Tapi begitu apa perannya ya? *Dangkadang* 0,05, *dangkadang* 0,04, ya takut semua. Jadi itu kira-kira.

Itu sementara sebagai masukan, mohon masukannya klarifikasi dan mohon jawabannya untuk kita memperbaiki nanti rekomendasi Panja ini sehingga nanti pada periode yang akan datang atau periode ini kita meninggalkan *legacy* Pak. *Legacy* tentu tidak lain akibat juga masukan saran dan pandangan Uda Fasli, Kang Nanang dan Mas Didi Rachmini.

Terima kasih pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Makasih Kang Ferdi.

Tadi poin yang menarik apa, pertumbuhan ekonomi akibat investasi di pendidikan seperti apa, saya pikir bagus sekali itu Kang Ferdi.

Yang jelas, ini catatan dari kita, waktu kita tersisa mungkin hanya 3 bulan ke depan, oleh karena itu Panja ini kami harapkan menjadi *basic* untuk kita melakukan revisi undang-undang Sisdiknas. Jadi nanti di periode berikutnya ini menjadi *baseline* juga untuk merekomendasikan undang-undang Sisdiknas karena di dalam undang-undang itulah kita bisa bicara yang mandatori tadi itu.

Baik Pak Fahmi dulu ya, Pak Fahmi, terus kemudian Pak Kadafi, Ibu Dewi Coryati.

Silakan Pak Fahmi.

F-PKS (Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., Med.):

Baik. Terima kasih, Kang Dede.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Prof, Prof. Fasli, Prof. Didik dan Prof. Nanang,

Pertama tentu terima kasih banyak telah hadir di Komisi X. Kami sering juga menyebutnya sebagai komisi peradaban. Adab sebelum ilmu ya, dan apa yang sudah Prof sampaikan, ini memberikan pencerahan yang sangat luar biasa dan memberikan api semangat yang berkobar-kobar ya. Dan saya melihat Prof. Fasli, Prof. Didik dan juga Prof. Fatah tidak berubah nih sejak saya kenal ya 10 atau 15 tahun yang lalu ya. Tetap semangat, tetap berapi-api, terutama Prof. Fatah.

Saya ingat ketika hadir di kelas-kelas beliau ya, tidak pernah lepas dari pandangan kritis terhadap kebijakan pendidikan ya. Menurut saya ini yang tidak boleh padam ya. *Cuma* yang perlu kita perhatikan adalah sekian tahun melakukan berbagai macam kritik, memberikan masukan-masukan tetapi pada akhirnya semua implementasi kebijakan itu sangat bergantung kepada *political will*. Sangat bergantung kepada para politisi yang punya otoritas, baik di legislatif dan terutama tentu saja eksekutif yang memiliki kewenangan untuk atau hal anggaran.

Kalau kita bicara masalah pembiayaan pendidikan, dan kita meyakini bersama bahwa pendidikan yang bermutu dan merata ke seluruh rakyat Indonesia, tidak bisa tidak memerlukan biaya. Saya ingat selalu ketika merujuk kepada *values* atau nilai agama ya, hampir setiap perjuangan keras kita yang diminta oleh Allah adalah *wajahidu bi amwalikum waanfusikum*. Jadi harta atau biaya itu memang menjadi faktor kritis, tak ada uang tak akan ada barang, begitulah kira-kira. Uda Fasli di Padang tuh selalu berlaku, tak ada barang tak ada barang ada, tak ada uang tak ada barang, artinya tidak ada uang abang melayang atau mutu akan mati ketika tidak ada uang.

Nah anggaran pendidikan yang sudah ditegaskan di konstitusi, tadi Prof. Didik sudah bilang 20% anggaran itu mandatori adalah semacam representasi atau wujud dari keinginan kita untuk menjadikan pendidikan kita ini harus menjadi lokomotif dan ini sudah jauh-jauh hari.

Kami nih di anggota DPR yang juga anggota MPR itu diwajibkan untuk melakukan sosialisasi empat pilar, saya selalu di berbagai kesempatan ketika sosialisasi empat pilar. Saya selalu menekankan bahwa sejak dahulu kala para pendiri bangsa kita sudah menetapkan sejak awal, bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kita semua paham, tidak akan mungkin bangsa kita berjaya kalau masyarakat ini tidak cerdas, dan kemudian akhirnya kita dapatkan fakta dan data ketika masyarakat tidak cerdas. Akhirnya menjadi bulan-bulanan para politisi yang bersikap pragmatis, memanfaatkan situasi dan kondisi mereka dan

akhirnya rekrutmen kepemimpinan akan kembali berulang dan akhirnya sampai sekarang.

Menurut saya nih, menurut saya ya, para pimpinan kita terutama di eksekutif, belum menetapkan, belum menjadikan pendidikan sebagai lokomotif. Maka akhirnya pendidikan nasional kita masih banyak PR, meskipun 20% sudah kita mandatorikan, tetapi pada akhirnya alokasinya itu menjadi seperti yang para Prof ketahui.

Oleh karena itu, saya setuju dengan Prof Semua, di dalam Panja Pendidikan ini, harus digarisbawahi bahwa yang pertama dan utama adalah memastikan bahwa pimpinan-pimpinan politisi kita, itu benar-benar harus memiliki pola pikir, paradigma, pandangan *human investment*. Harus benar-benar menjadikan pendidikan ini sebagai lokomotif.

Kalau tidak ada faktor seperti ini, maka saya meyakini akhir 20%, 650 triliun itu akhirnya akan menjadi rebutan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, ingin memanfaatkan dana tersebut ya. Bukan untuk investasi tetapi akhirnya itu dijadikan berbagai macam keperluan yang diberi label berfungsi untuk pendidikan, walaupun itu sumir, walaupun tidak jelas. Jadi itu pertama perlu terus menerus disuarakan bahwa pendidikan itu *human investment*. Ketika tidak ada pola pikir seperti itu, maka tidak akan mungkin kita bisa membawa bangsa ini beradab begitu.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan atau sekaligus juga bertanya kepada para Prof adalah ketika kemudian 20% itu kita upayakan menjadi, menjadi efektif, katakanlah ya efisien. Tetapi tetap saja, seperti yang Prof. Nanang tadi sampaikan, analisis kebijakan, analisis berdasar sampel Kota Bandung, ternyata biaya pendidikan besar sekali Prof, besar sekali begitu, bahkan kalau mau dituruti habis APBN kita. Tetapi kan kita tidak bisa bergerak berdasarkan tataran ideal karena negara kita masih seperti ini. Maka pertanyaannya adalah dalam kondisi yang terbatas, meskipun kita berupaya untuk mengoptimalkan 20% tadi, maka tentu harus ada pendekatan-pendekatan yang bijak ya, yaitu misalnya masalah prioritas.

Kalau tadi kemudian Prof. Nanang Fatah menyampaikan bahwa *main driver* dari mutu pendidikan itu adalah *learning process*. Apakah kemudian alokasi biaya pendidikan lebih banyak diarahkan ke sana misalnya? *Nah* saya memandang *learning process* ini, intinya adalah guru.

Saya 30 tahun membina sekolah swasta dengan berbagai macam kesederhanaan di berbagai pihak, tapi kami tidak bisa main-main dalam hal guru, maka kita rekrut guru dengan berbagai macam usaha, termasuk juga memberikan kesejahteraan yang yang cukup. Jadi kompetensi dan kesejahteraan lalu kemudian memberikan berbagai macam upaya. Walaupun infrastruktur, walaupun kelas sederhana. Sering saya kasih contoh, misalnya pendidikan di Yogya yang diasuh oleh siapa? Bukan pendeta, siapa tuh yang di Kali Code?

AUDIENS:

Romo.

F-PKS (Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., Med.):

Nah, Romo Mangun itu kan di bawah jembatan anak-anak, sederhana tapi berkualitas karena dedikasi para pengajar. Kami juga punya contoh di Depok, sekolah di terminal ya. Itu ternyata luar biasa bagus karena guru-gurunya berdedikasi dan diberikan *support* yang cukup.

Pertanyaan saya adalah apakah realistis kalau kemudian alokasi anggaran yang terbatas itu lebih banyak kita berikan kepada *learning process*, khususnya kepada SDM guru?

Itu barangkali pertanyaan sederhana saya. Mudah-mudahan ke depan saya berharap Komisi X ini benar-benar menjadi komisi yang mampu mengawal dan mengontrol seperti tadi tawaran dari Prof. Fasli Jalal dan Komisi X akan semakin kuat ketika profesor-profesor seperti Bapak-Bapak sekalian ini menjadi *backbound* Komisi X. Jadi terus menerus memberikan masukan-masukan. Karena kalau para Profesor ini tidak mendapatkan saluran politik, saya khawatir 10 tahun bersuara tetap tidak efektif gitu. *Nah* mudah-mudahan Prof semua bisa mengalir lewat partai politik atau bisa juga kepada Komisi X.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Fahmi.

Saya perpanjang waktunya ya. Sampai jam maksimal jam satu ya, maksimal, karena mesti ishoma dan lain-lain.

Berikutnya Pak Kadafi.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

Baik.

Terima kasih pimpinan.

**Yang saya hormati, Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi X,
Yang saya banggakan para narasumber,
Ini ada Prof. Didik ada Prof. Nanang kemudian juga ada Prof. Fasli Jalal,**

Ini Kang Dede orang tua saya ini, beliau saksi nikah saya, Prof. Fasli Jalal. Hari ini, *Alhamdulillah* kita sangat diperkaya dengan masuk masukan-

masuk dan data-data dan saya kebetulan diamanahkan Partai Kebangkitan Bangsa juga di Badan Anggaran. Saya menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan 20% amanat konstitusi belanja negara untuk pendidikan. Dan saya sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani bahwa anggaran pendidikan yang fungsi pendidikan yang diberikan kepada daerah-daerah, ini belum ada aturan turunannya Kang Dede. Maka yang disampaikan oleh Prof. Fasli tadi banyak sekali daerah-daerah yang belum melaksanakan fungsi pendidikan, sesuai dengan amanat konstitusi.

Kemudian juga saya, saya melihat data, ternyata itu dari daerah-daerah yang belum melaksanakan amanat konstitusi. Ternyata itu banyak daerah-daerah ternyata anggaran belanja daerahnya pun SILPA gitu, punya kelebihan. Artinya perencanaan yang yang matang belum dilaksanakan dengan baik. Harusnya dengan data yang disampaikan oleh Prof. Fasli tadi, bagaimana dalam pengelolaan postur anggaran, ini bisa menjadi acuan untuk mereka dalam pengelolaan anggaran transfer daerah tersebut.

Oleh karena itu, saya sangat setuju bahwa kita harus memantau dana TKD ini dengan sebaik-baiknya, karena ini menjadi dana terbesar dari apa pengalokasian postur anggaran pendidikan.

Kemudian juga tahun ini, tahun depan, menjadi suatu kendala juga begitu banyak anggaran-anggaran pendidikan ternyata di Kemendikbudristekdikti itu anggarannya turun.

Nah ini menjadi catatan hampir 15 triliun turun Prof di Kemendikbudristekdikti, padahal saya sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani, kampus kampus terkemuka di Indonesia, hampir sebagian besar di QS World University itu di atas angka 200 rankingnya. Sedangkan kita *nggak* usah bilang dengan Singapura, kalau Mas Putra dengan Singapura kita terlalu jauh, mereka 10 besar semua. Yang paling dekatlah kita dengan Malaysia.

Universitas Malaya, itu mereka sudah udah masuk di 100 besar di nomor 60. Universitas Malaya itu satu kampusnya, anggaran pendidikannya itu 1,5 triliun. Sedangkan Indonesia mengelola 3.000 lebih kampus, baik PTN maupun juga PTS itu anggaran Kemendikbud, apa Dirjen Dikti itu hanya 30 triliun. Artinya ya benar ini disampaikan oleh Prof. Nanang tadi, ya secara anggaran saja kita tidak ada keberpihakan. Tentunya ini akan mempengaruhi bicara kualitasnya ditambah sekarang ya, kita ketahui bersama, tambah ke sini anggaran pendidikan semakin tidak fokus dalam pengembangan ke mana tujuan sasaran visi kita, apa yang kita kejar itu.

Nah ini menjadi beberapa hal yang memang harus kita berjuang bersama Kang Dede, agar postur anggaran yang cukup besar dana transfer ke daerah itu, benar-benar dibelanjakan tepat sasaran dengan adanya aturan turunan. Hari ini dengan tanpa ada aturan turunan, akhirnya ya yang disampaikan tadi hal-hal yang tidak penting di pendidikan, asal agak-agak sedikit arahnya ke pendidikan bikin pagar dan sebagainya, itu disebut sebagai dengan fungsi pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih, saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih.

Yang dimaksud tadi peraturan turunan tuh sebetulnya ada PP 18 Tahun 2022 yang merubah PP 17, yaitu kalau dulu itu urusan penganggaran pendidikan itu hanya Bappenas dengan Kementerian Keuangan, lalu di PP yang 18 itu Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan. Dengan demikian nanti pengalokasian anggaran pendidikan tadi mengajak Kementerian Pendidikan. Itu sebabnya kami di situ bisa masuk. *Nah* PP 18 ini sudah ada Tahun 2022 tapi belum dilaksanakan sampai sekarang. Ini yang nanti akan kita desak juga.

Berikutnya Ibu Dekor.

Silakan.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Saudaraku Didi Rachmini,

Ini abang saya, kalau Kadafi bilang itu saksi nikah, kalau itu ada abang saya juga jadi saya punya lah ya.

Dan tentunya Prof. Nanang dan Prof. Fasli,

Alhamdulillah hari ini mendengarkan luar biasa masukan yang sangat bernilai sulit untuk diungkapkan dan kita bersyukur bahwa ternyata ini juga pembiayaan ini sudah maksudnya terlihat dengan jelas. Tinggal sekarang, apakah ada keinginan untuk bisa merubahnya menjadi hal yang ideal untuk pembiayaannya? *Nah* yang ada beberapa yang saya ingin tanyakan.

Yang pertama, ini implementasi 665 triliun ini ada masalahnya seperti ini kan TKDD-nya itu 356,5 triliun sekitar 52% dan itu semuanya ditransfer ke daerah dan dana desa. Ada masalah dengan otonomi daerah, kalau sudah musim pemilu, ini maka kepala daerahnya siapa?

Terus fungsi, fungsi-fungsi pendidikannya jadi rada-rada kacau balau dan juga misalnya memilih kepala dinasnya juga sesuai selera karena di

pendidikan itu nampaknya cukup banyak bisa mendapatkan uang-uang, itu barangkali ya. Sehingga jadi kepala dinasnya itu dipilah yang menurut mereka mampu sesuai keinginannya.

Nah apakah memungkinkan kalau ini ada banyak keluhan dari para guru-guru, kepala sekolah gitu, mereka mengatakan, “Bu Dewi sejak seperti ini kami di bawah bupati atau walikota atau di bawah gubernur kalau sudah musim pilkada kami ini siap-siap tergusurkan” seperti itu dan ini kan ada hubungannya dengan adanya transfer daerahnya gitu. *Nah*, apakah memungkinkan kalau seperti yang akan datang itu untuk guru-guru kepala sekolah itu kinerjanya, jabatannya itu ditentukan dari pusat kembali itu?

Yang kedua, bagaimana fungsi pengontrolannya dengan TKDD ini? Karena kalau Komisi X itu tidak memungkinkan untuk melakukan fungsi kontrol padahal ini kan transfer yang di dapatkan dari APBN.

Yang ketiga dan juga ini kan banyak sekali uang yang ada di Kementerian atau lembaga lain yaitu sekitar 32,859 triliun yaitu sebesar 5%, *nah* ini juga kesulitan untuk fungsi pengontrolannya. Apakah itu mereka bisa maksudnya ya bersuka, suka-suka aja ya, suka-suka aja dalam menyelenggarakan atau membelanjakannya? Dan satu hal lagi agak sulit juga ini 32,859 triliun, sedangkan yang pokoknya aja di Kemendikbudtristek itu 98,9 triliun sekitar 15%. Kok dananya ini terlalu gimana ya, di luar itu lebih besar daripada yang pokoknya?

Dan yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan. Ini kan uangnya segini 98,9 triliun, Panja ini ingin membuat pembiayaan atau belanja untuk pendidikan itu semaksimal mungkin 20% dikelola dengan benar dan berada, kalau bisa di dalam satu kementerian, sehingga bisa dilakukan fungsi kontrol. Tapi kan kenyataan hidup, ya udahlah segini uangnya yang ada 98,9 triliun. Kalau menurut Profesor sebaiknya uang segini nih buat apa ya, fokusnya ya? Tadi kan ada perfokusan tadi saudara saya mengatakan gimana kalau kita fokus di guru?

Yang kedua, kalau saya berpikir apakah mungkin kita misalnya menseleksi murid-murid yang cerdas, kemudian itulah di, karena uangnya terbatas ya, terus itulah di-*support* dengan baik. Sehingga nanti dia bisa menularkan ilmunya dengan yang lain-lainnya. Jadi mohon kiranya itu bisa mendapat jawabannya.

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bu Dewi Coryati.

f

Setelah Pak Johar, Ibu Lisda, Pak Johar.

Silakan, Prof. Johar.

F-GERINDRA (Prof. Dr. Ir. H. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Makasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan anggota dan para sahabat,
Tentunya ya Pak Profesor yang luar biasa informasinya ini yang kita dapatkan,**

Terima kasih.

Yang ingin saya sampaikan permasalahan sekarang perebutan dana ya KUT dan segala macam. *Nah* ini kayaknya seperti semaput nih Pimpinan. Perguruan tinggi *nggak* tahu sumber dana dari mana-mana, yang taunya hanya dari mahasiswa.

Nah jadi ini sangat mengherankan saya katakan waktu rapat dengan beberapa yang lalu raker. Cobalah diajari rektor-rektor perguruan tinggi negeri itu bagaimana cara hidupnya rektor-rektor perguruan tinggi swasta, karena mereka tiap bulan memikirkan berapa gaji yang harus diberikan kepada dosen kepada seluruh dosen, pada pegawai ini.

Kan sudah di PTS sekarang memikirkan anggaran itu dan dari uangnya itu sudah terbiasa PTN kan terima bersih, maka berubahlah cara berpikir, harus membentuk *fund rising* yang halal dari setiap perguruan tinggi. Di luar negeri seperti itu, perguruan tinggi itu tidak mengharapkan uang dari kuliah dari mahasiswanya untuk hidupnya. Mereka punya bisnis-bisnis, usaha yang dibenarkan. Kenapa tidak sekarang aja di ada tambang emas tambang batu bara atau usaha bisnis apa pembangunan segala macam maatkanlah, jadi tidak harus ke mengerok dana dari mahasiswa. *Nah* ini harus kita anukan.

Nah kemudian eh dengan adanya dana itu, maka kajian-kajian penelitian makin banyak kita bisa dapatkan. Artinya *income* perguruan tinggi itu semakin makin besar. Jadi maulah diajarkan kepada para rektor PTN ini bagaimana perjuangan untuk mencari dana itu tidak seperti sekarang, duduk aja pun dia uangnya tersedia.

Nah kemudian masa belajar sekolah ini memang pengertian sangat ini karena terjadi di kampung kami pada zaman sultan sampai tahun orde lama itu masih dipakai. Kok SD, tapi dulu namanya MR (Madrasah Rendah) itu hanya 2 tahun, hanya 2 tahun, jadi saya saya termasuk muridnya ya. Jadi yang dipelajari itu membaca, menulis, berhitung dan akhlak. Wah disiplinnya luar biasa, 2 tahun cuma. Lulus masuk MMP (Madrasah Menengah Pertama), 3

tahun, di situ bahasa Arab sudah bisa baca, baca kuning apa kitab kuning dan sebagai-sebagainya. Lulus masuk MMA (Madrasah Tengah Atas) 3 tahun. Wah itu udah siap MMA sudah luar biasa itu ilmunya luar biasa. Lulus langsung bisa diterima di perguruan tinggi di Arab dan di Eropa. Ada lulusan situ yang ke sana, dibiayai oleh Sultan, jadi di Al Azhar di Mekah, di Sorbonne Prancis. Orang kampung kami itu ada lulusan itu, diakui ijazahnya yang cuman 3, 3, 2 ini diakui di sana.

Nah kita memang seperti Profesor tadi dikatakan pelajaran ulang-ulang itu itu juga, dan kadang-kadang yang tak mungkin perlu dipelajari kan perlu kita pangkas ini umur nih ya, karena sayang sekali, biayanya besar dan kesempatan untuk berbakti bagi rakyat kita tuh waktunya terlampau banyak untuk di sekolah ya. Banyak sekolah ini perlu, perlu kita kaji ini ya, dikaji seperti itu. Banyak hal yang harus kita perbaikilah dalam pendidikan, pendidikan undang-undang, pendidikan kita ini sehingga pendidikan itu betul-betul menuju ke kualitas yang dihalaukan.

Nah kita tahu bahwa pendidikan kita mengharapkan orang menjadi orang terbaik. Tapi yang ternyata lulusan perguruan tinggi itu paling banyak masuk dalam perkara pidana ya lulusan perguruan tinggi. Jadi artinya etika ya akhlak, adab itu kita kesampingkan ya. Kita lihat di negara-negara lain itu yang didulukan. Bagaimana tadi dicatatkan yang Singapura ya, bagaimana di Korea dan sebagainya itu didulukan baru ilmu.

Nah jadi karena kita ilmu duluan daripada akhlak, ya sehingga kita kalau ada olimpiade-olimpiade tingkat dunia Indonesia itu juara terus itu, karena sama-sama *high school* tapi mata pelajarannya kita lebih tinggi. Karena mereka tidak mendulukan mata pelajaran, mendulukan etika.

Nah anggaran kita ini jadi perhatian yang serius juga ya. Berapa pun yang kita bikin anggaran itu *nggak* merubah sikap bangsa kita. Karena tadi pondasi-pondasi yang ketiga Profesor sampaikan itu tidak diamankan di pendidikan kita. *Nah* ini perlu ada revolusi pendidikan kita ini, supaya kembalilah ya ke jalan yang benar ya. Memang salah kita *sih* menterinya bukan orang pendidikan. Tidak pendidikan dan tidak lulus kan? Kan belum Doktor, mengurus Doktor, mengurus Profesor, ya *kalangkabut*, ya salah kita.

Ini saja dari saya terima kasih. Terima kasih saya salut sekali bahannya banyak sekali yang kita dapatkan ini, memperkuat kita untuk memperjuangkan agar Indonesia ini kembalilah ke jalan yang benar.

Terima kasih, mohon maaf.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarokatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof.

Ibu Lisda silakan.

F-NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr.):

Baik terima kasih Om Dede.

Bismillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati, Pimpinan dan teman teman Anggota Panja Biaya Pendidikan dan,
Yang saya hormati para pakar narasumber kita Profesor Didik, Profesor Nanang dan juga Prof. Fasli,**

Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semua. Dari sebulan ini, kami di Komisi X menerima tamu dari berbagai elemen Pak. Dan saya senang sekali bisa mendengarkan aspirasi apapun dan juga khususnya masukan-masukan atau jalan keluar ya, ya dari apa permasalahan yang kita temukan.

Saya ada di Komisi X kurang lebih 1 tahun. Jadi ya masih terus karena di sini banyak senior-senior ya, tentu saya terus memperhatikan kenapa ya kok permasalahan-permasalahan yang tadi juga Prof sampaikan, kok belum juga selesai gitu? Tadi kalau teman saya menyampaikan mungkin menterinya bukan dari orang-orang dunia pendidikan kan ya, mungkin tentu kita berharap ke depan akan lebih baiklah. Artinya yang sesuai yang benar-benar paham dan juga dapat mengundang para pakar-pakar dan juga bisa berkomunikasi baik dengan Komisi X. Karena dalam hal ini dengan pembahasan di Panja Biaya Pendidikan ini, ini banyak sekali masukan yang kita terima.

Tadi Kalau saya lihat catatan-catatan yang dari Profesor semua ya, mulai dari Prof. Didik, ini tentang penyesuaian uang kuliah dengan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Artinya setiap masyarakat itu punya kemampuan yang berbeda-beda, jadi tidak semua bisa diperlakukan sama termasuk juga makan siang karena *nggak* semua anak itu, butuh makan siang gratis gitu. Mungkin dia makan siangnya lebih baik daripada apa yang akan dikasih nantinya ya, jadi jangan sampai hal-hal itu jadi tidak tepat sasaran gitu. Tapi untuk yang tertentu memang harus betul-betul kita perhatikan.

Begitu juga dengan transparansi dalam penetapan uang kuliah ya. kalau memang kemarin itu ada pembicaraan tentu tidak akan ada gejolak seperti yang terjadi kemarin itu.

Begitu juga dengan pemeratan akses di seluruh Indonesia. *Nah* ini sangat penting sekali Pak karena kami sendiri di Komisi X, *alhamdulillah* ada kesempatan untuk membawa aspirasi ya atau KIP untuk kuliah tersebut kepada masyarakat, tapi memang dalam jangkauan yang sangat terbatas karena kami

hanya di dapil kami masing-masing seperti itu. Tapi itu *alhamdulillah* sudah cukup membantu, tapi tentu kami berharap akan lebih bisa merata di seluruh Indonesia.

Kemudian dari Prof. Nanang tadi tentang pendidikan itu harusnya di pandang sebagai investasi ya Prof ya, ya kemudian juga tentang *lost of adab, wah* ini saya sangat-sangat apa, *concern* lah di sini. Karena kita mempelajari bahwa di dunia negara-negara maju yang dunia pendidikannya sudah sangat bagus itu, justru anak-anak yang kelas-kelas dasar, kelas-kelas TK itu justru yang mengajar itu adalah orang-orang yang betul-betul kompeten, profesor-profesor orang-orang yang justru gajinya lebih besar gitu. Jadi betul-betul profesional, karena di situ kita apa menitipkan akhlak, kepada dasar, pada anak-anak di masa *golden age* mereka gitu.

Nah sementara kalau kita *nggak* mohon maaf banyak juga yang menjadi guru-guru TK, PAUD itu adalah orang-orang yang mohon maaf daripada nganggur gitu ya. Mungkin pelatihan juga seadanya kompetensi juga tidak paham, dari kompetensi yang ada pun, dari empat kompetensi yang ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, mungkin yang selama ini mendapatkan pelatihan hanya satu atau dua kompetensi, pedagogik sama profesional saja. Sementara masalah kepribadian, sosial yang harusnya itu menjadi dasar ya gurunya aja belum paham gitu. Bagaimana bisa menerapkan itu di dalam mereka mengajar dan bisa memberikan apa digugu dan ditiru oleh anak-anaknya? Seperti itu.

Jadi ini banyak sekali memang PR kita, tapi kita tidak boleh patah semangat dengan masukan yang Prof berikan ini luar biasa sekali. *Inshaallah* saya sih harapannya menteri pendidikannya ini ada di ruangan ini gitu besok-besok ya, maksudnya dari, dari ruangan ini gitu ya, ada di sini. Dan karena sudah benar-benar memahami permasalahan dan tentu juga dekat dengan orang-orang bisa memberikan masukan seperti Prof semua, sehingga bisa mendapatkan jalan keluar terbaik tentunya untuk Indonesia.

Gitu juga dengan Prof. Fasli, terima kasih banyak Prof, ini angka-angka ini luar biasa. Saya kemarin itu apa ya mungkin saya termasuk orang yang *nggak* terlalu apa dengan angka-angka gitu ya Prof ya tapi ini tadi Prof menjelaskannya sangat apa terbuka, *ringkes* dan di sini. Wah terlihat ternyata ada 100 triliunan cadangan yang harusnya bisa lebih bisa dimanfaatkan gitu ya dan lain-lain juga. Termasuk juga dengan pemerintah daerah yang ternyata juga belum melaksanakan yang harusnya menjadi kewajiban sebagai amanah undang-undang yang 20% tadi.

Jadi terima kasih, saya tidak ada pertanyaan Pimpinan. Tidak ada karena tadi teman-teman sudah mewakili, terlalu banyak ini PR-nya sebenarnya. Tapi saya berharap kita dapat terus berkomunikasi bersama kami Prof. selama kurang lebih 3 bulan ke depan untuk ke depan lebih baik.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Lisda.

Saya ingatkan kawan-kawan, waktunya tinggal 15 menit. Beliau-beliau belum menjawab, jadi mohon di di apa, di-*quick*, dipercepat.

Oke Pak Zainudin.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Baik.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi X,
Prof. Nanang, Prof. Didik Prof. Fasli yang saya hormati dan saya banggakan,**

Saya sampai kesimpulan bahwa ini persoalannya pada faktor politik Ini. Jadi yang ditulis Prof Didik, saya kira itu langsung menyentuh pokok persoalan. Bukan hanya politik pendidikan tinggi, tapi saya kira politik pendidikan, politik anggaran.

Jadi kuncinya di politiknya itu sendiri bahwa politik kita itu ternyata di tangan di tangan elit tertentu, yang elit itu kebetulan belum menyadari bahwa pendidikan adalah jembatan menuju Indonesia emas. Belum menjadikan pendidikan sebagai panglima, sehingga kemudian anggaran yang sudah disiapkan dengan mandatori yang menurut hemat saya cukup, 20%. Saya kira kalau digunakan dengan cara yang efisien dengan manajemen yang baik, saya kira bisa mempengaruhi pendidikan atau bisa menyelenggarakan pendidikan, sehingga kemudian pendidikan kita bisa menghasilkan sumber daya manusia sebagaimana yang kita harapkan. Ini kayaknya pemegang kuasa politik anggaran ini belum memandang pendidikan sebagai panglima. Ini persoalannya menurut saya. Kita juga di Komisi X agak repot juga, misalnya mengeluh Kementerian Pendidikan anggarannya hanya mendapatkan porsi 15%. Kita juga ingin mendorong, tetapi yang ada saja belum dikelola dengan baik, gitu loh.

Nah nanti kalau kita dorong tambah menjadi 20% misalnya, apakah kemudian juga bisa menyelesaikan persoalan? *Nah* kita minta *roadmap*. Kita minta peta jalan. Sampai hari ini peta jalan itu belum diberikan. Jadi kalau kita dorong anggaran harus ditambah lagi, kira-kira ke mana arahnya? Jadi misalnya kita ingin menghasilkan perguruan tinggi seperti apa sebenarnya yang kita inginkan itu? Ini jawabannya juga belum jelas, maunya PTBNH, PTNBH yang sehingga kemudian mandiri tetapi PTNBH-nya seperti yang kita rasakan, malah menjadi ancaman bagi perguruan tinggi swasta. Seperti

digambarkan Prof. Didik tadi kan, membuka penerimaan mahasiswa baru itu sebanyak banyaknya, lalu ditambah dengan UKT setinggi-tingginya. *Nah* ini, ini solusinya, jadi peta jalannya memang belum jelas gitu.

Nah jangan-jangan juga, ada yang ingin Indonesia ini tidak maju, sehingga elit kita ini tidak menjadikan pendidikan sebagai panglima, gitu. Ada survei yang menunjukkan Indonesia itu skor efisiensinya, itu skor efisiensinya itu ya itu skornya 6, sementara Singapura itu 4. Tadi disebut-sebut Singapura sebagai apa namanya referensi efisiensi, Amerika 4, artinya kalau ingin mendapatkan uang 1 dolar *effort* 4, kalau Indonesia harus 6. *Nah* pendidikan kita belum bisa menghasilkan manusia yang efisien seperti ini. *Nah* karena apa? Karena peta jalannya memang *nggak* jelas gitu. Jadi anggaran kita sudah *nggak* fokus peta jalannya juga *nggak*, *nggak* jelas.

Nah dengan politik yang menurut saya belum berpihak kepada pendidikan, maka kemudian yang terjadi, siapa yang kuat itu yang menentukan? Program *follow money* atau *money follow program*? Itu apa, kata yang, yang punya kuasa politik, itu berarti. Kami kalau turun ke daerah kita *nggak* tahu di Dapil saya itu kok tiba-tiba dapat DAK sekian dan yang dapat itu ini, kita *nggak* tahu. Kita tidak ikut bisa mengontrol itu. Harusnya Komisi X kan tahu tapi faktanya kita tidak bisa ikut ngontrol. Artinya di situ ada kuasa, relasi kuasa. Kembali lagi soal politik.

Saya khawatir berlaku pepatahnya orang asing itu ya, terpaksa saya menyebutnya ya, ini yang juga sering dikutip oleh presiden terpilih ini. *The strong do what they can and we suffer what they must*, kalau orang itu kuat bisa berbuat apa saja, yang lemah menderita.

Perguruan tinggi negeri apalagi kalau tadi Prof. Didik menginginkan 10 perguruan tinggi negeri yang kuat itu diberi *previlege* supaya bisa melahirkan manusia-manusia berkualitas internasional. Jangan-jangan kemudian 10 ini menjadi yang kuat melakukan apa saja lalu, memakan yang lemah. Ini saya khawatir begitu. Kalau iklim politiknya seperti ini, yang kuat melakukan apa saja yang lemah kemudian menderita. Perguruan tinggi negeri membuka penerimaan mahasiswa semauanya, sebanyak-banyaknya, UKT setinggi-tingginya, swasta kemudian *nggak* mendapat kesempatan. Padahal swasta selama ini juga memberikan kontribusi, bahkan menurut hemat saya rektor-rektor perguruan tinggi negeri belajarlah kepada rektor swasta. Kenapa? Karena rektor swasta itu berpikir mencari uang lalu kemudian menggunakannya dengan baik. Kalau perguruan tinggi negeri rektor perguruan tinggi negeri tidak berpikir mencari uang, yang dipikir menghabiskan uang kan begitu Pak.

Nah saya kira itu Pak, ini politik anggaran. Ini menurut saya soal relasi kuasa. Kalau budaya politiknya masih yang kuat mau semauanya saja, tidak mau berbagi, tidak mau mengatur sesuai dengan aturan yang ada. *Nah* itu saya kira kita akan sulit itu merealisasikan politik anggaran. Sudah ada PP Nomor 57 Tahun 2022, di mana semua lembaga yang mengelola pendidikan itu haruslah jelas, haruslah spesifik, dengan tidak *overlap* dengan yang lain. Tapi

faktanya PP seperti ini juga tidak jalan, ini sekali lagi merupakan bukti bahwa budaya politik anggaran pendidikan kita, belum bisa kita jalankan dengan baik

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terakhir Pak Fikri mau memberikan *statement*.

F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):

Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

**Kang Dede dan Bapak Ibu Anggota Komisi X,
Dan tiga profesor yang saya hormati,**

Saya tidak akan memberikan komentar atau mungkin juga ini pendapat atau apa pandangan, tapi mau minta tuntutan lanjutan.

Jadi kalau Bapak tiga Profesor ini karena kayaknya lengkap nih Prof Didik ini sudah pernah duduk di sini, sehingga tahu kita ini mau apa di sini itu bisa apa gitu, kita tahu gitu.

Kemudian Prof. Fasli juga begitu ini kan sudah di sana sudah lama dan bahkan dari satu kursi ke kursi lain, dari meja satu ke meja lain. Kemudian Prof. Nanang juga begitu. Ini saya lihat kayaknya kalau Prof. Didik ini makro, ini sudah sangat sudah sangat mikro. Sampai, sampai mana yang apa namanya teknik, mana yang non teknik atau mungkin yang sains dan sebagainya tentu harganya beda, satuannya beda dan sebagainya sampai seperti itu.

Nah saya mungkin bertiga, ini untuk bertiga karena supaya ini manfaat supaya ini, Kang Dede ini ketua Panja sekarang ini dan waktunya cuma 3 bulan ya kak. *Nah* maksudnya bukan untuk menteri yang sekarang atau mungkin ini tapi untuk supaya bisa ada, bisa dilaksanakan ini, jadi supaya jadi, iya supaya ini bisa dilaksanakan. Kan tahu ini apa yang kita lakukan itu tahu nih, misalnya Prof. Didik ini kan duduk di sini tahun berapa Prof? 2004 2009, padahal ini kan banyak peristiwa, termasuk banyak kejadian hukum juga yang menyangkut Komisi X yang kemudian ada kondisi berbeda secara hukum. Misalnya 2014 itu Pasal 15 apa ya Undang-Undang 17 2003 itu dicabut kewenangannya oleh MK, sehingga kita tidak bisa bahas sampai satuan 3.

Nah ini kan mungkin saran atau apa yang realistis sesuai dengan undang-undang itu, jadi karena kewenangan sampai membahas satuan 3 tidak boleh, sebelumnya kan boleh Prof? *Nah* karena undang-undang itu mengamanatkan bisa sampai apa kebijakan apa kegiatan ya namanya kalau sekarang per-program ya Pak? Pak sampai program saja?

Jadi itu kepada semuanya saja, saya mungkin kalau merunutkan seperti apa saya mau minta, selanjutnya itu mungkin dalam 3 bulan ini diundang atau tidak diundang syukur, tapi ini minta keikhlasan amal saleh gitu, buah pemikiran yang tentu sesuai dengan, kalau bahasa sekarang sesuai dengan undang-undang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), itu kan ada lima pendekatan.

Yang pertama *top down*, *top down* itu biasanya masuknya biasanya ke ini akan jadi pemerintahan yang akan jadi atau presiden yang terpilih itu kan punya janji-janji, nanti akan diverifikasi di sini menjadi RPJM. *Nah* kalau bisa apa ini usulan atau *statement* apa yang sehingga sangat bermanfaat yang nanti bisa dibuat ini pendekatan *top down*, mungkin bisa diusulkan ke. Karena ini kan Kang Dede tadinya di luar sekarang, kan di dalam jadi kan bisa ngusulkan lewat presiden terpilih umpamanya begitu.

Nah jadi yang itu masuk ke RPJM jangka menengah paling tidak, karena RPJP saya *nggak* tahu karena di, di ini di apa ya namanya? Di bidang pendidikan ini kita dorong untuk ada *grand design* atau rencana induk pendidikan aja masih belum Prof. Jadi apa, belum jadi kemarin mau jadi namanya apa, peta jalan tapi berhenti gara-gara banyak terlalu banyak kritik, Mas menteri berhenti. *Nggak* tahu ini yang paling tajam, kayaknya tentang apa ini, frasa agama. Kemudian akhirnya padahal kan sebetulnya biasa-biasa saja. Mestinya bisa lanjut tapi *nggak* lanjut jadi sekali lagi satu itu.

Kemudian kalau menurut pendekatan itu, sistem perencanaan pembangunan nasional itu ada, apa namanya, azas atau pendekatan *bottom up*. Kalau tadi *top down* itu berarti di ini, *statement* apa atau apa, apa ya namanya? Pernyataan apa yang ini nanti untuk arah pendidikan ini bagus jadi dan realistis gitu.

Yang kedua, kalau *bottom up* di lapangan tentu Aceh sampai Papua. Jadi kalau Prof Yudi Latif pernah di sini memberikan masukan pada Panja apa pokoknya tentang pendidikan. Pendidikan itu seperti kereta yang di apa ditarik oleh beberapa beberapa kuda, kita tidak bisa pakai standar kuda yang paling kuat, tapi standarnya adalah kuda yang paling lemah.

Nah begitu kira-kira, sehingga mungkin ini apa, apa namanya langkah apa sehingga kita realistis itu. Jadi nanti usulan ini atau rekomendasi nanti ini kan nanti ada kesimpulan, nanti ada usulan, kemudian ada rekomendasi itu realistis nanti, jadi ini seolah jadi *bottom up-lah* gitu kira-kira. Jadi kan *top down*, kemudian ini *bottom up*.

Kemudian teknokratik. *Nah* ini pendekatan teknokratik para Profesor tahu tadi di 20% itu 52% ada di transfer daerah, kemudian 13 sampai 15% ada di K/L lain. Ini kan kalau kondisinya seperti kesehatan tadi Prof Didik nyampaikan ini kalau *nggak impeachment* ini. Tapi kan mesti ribut ini K/L itu K/L lain. Saya kira akan *nggak* mau kemudian ini nya dilepaskan begitu saja ini. Ini kondisi sekarang, ini kondisi sekarang kan *nggak* ada mau *impeach*, *nggak* ada ini apa segala macam atau atau ada usulan apakah supaya kondisinya memungkinkan, untuk bisa ini kita *nggak* akan bisa anu, terlalu bisa mengubah ini.

Nah secara teknokratik, karena teknokratik itu ya tergantung di trilateral meeting. Jadi Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian sektoral itu. *Nah* sementara *bargaining*-nya begini saja, jadi mungkin ada usulan, kemudian pendekatan partisipatif. Mungkin apa yang, siapa yang perlu dihadirkan lagi di Komisi X ini. Sehingga ini mewakili semua gitu pendekatan partisipatif.

Yang terakhir pendekatan politik. Mungkin yang tahu, Pak Didik *nggak* tahu saya, Prof Didik di sini pernah di Banggar atau tidak ya. Kita tahu ada mekanisme, ada ini segala macam. Karena konon katanya ini, kalau para dewa udah apa, bisa punya keinginan yang sama, selesailah, gitu kira-kira. *Nah* ini baik itu di eksekutif maupun di sini. Andaikan mungkin di sini umpamanya di komisi ya, kemudian di Banggar ya dan sebagainya. Tapi secara politik ini, supaya ini apa di-Pansus-kan tadi misalnya, kalau ini Panja. Kalau sekarang ini masih Panja, kalau pansuskan ya, waktunya kapan? *Nggak* ada kalau 3 bulan, saya kira *nggak* realistis.

Nah ini saya minta masukan yang lebih komprehensif untuk bisa masuk ke itu kesimpulan. Kemudian nanti rekomendasi dengan kondisi tadi perubahan secara hukum juga berubah, ada di-*drive* dengan Undang-undang SPPN. Paling tidak kita kalau ini kan undang-undang kementerian, Kementerian Keuangan, Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang SPPN ini Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang 25 2004. Kemudian satunya undang Undang-undang Sisdiknas sendiri. Begitu, *matur nuwun*.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Terima kasih Pak Fikri.

F-GERINDRA (Prof. Dr. Ir. H. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Satu menit saja, nambah.

KETUA RAPAT:

Oh mewakili pemerintahan yang baru?

F-GERINDRA (Prof. Dr. Ir. H. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Iya.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Makasih Pimpinan.

Mohon maaf, mohon maaf saya ingin nanti minta pendapat dari ketiga pakar kita luar biasa ini. Ada kesan perguruan tinggi negeri kekurangan dana ya, jadi mereka mencari dana dengan program membuka mandiri. Mandiri juga menambah beban ya. Hendaknya kalau kita, gimana kita mendorong agar PTN PTN ini konsentrasi buat S2 dan S3. S1 sesuai kemampuan berapa kemampuan mereka? Oh 500, oke jangan dipaksakan dengan mandiri dengan membuat ya kueh-kueh dan lainnya jadinya kan nambah beban.

Jadi kalau kemampuannya menerima mahasiswa baru itu 5.000, oke sudah cukup jangan ditambah lagi maka mereka konsentrasi S2 S3, ini aja barangkali minta masukan dari tiga pakar itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pas 1 menit.

Terima kasih.

Saya tidak bertanya, tetapi mungkin hanya memperkuat saja, bahwa kayaknya memang perlu kita para akademisi ini untuk sama-sama menggulirkan bola ini. Karena kemarin waktu permasalahan guru honorer, mungkin Mas Didi waktu di sini juga, ada guru honorer. Setelah sekian lama kita kawal terus akhirnya dibukalah kesempatan yang 1 juta buat guru honorer itu dan akhirnya ini berjalan, lintas komisi.

Nah ini memang masalah pembiayaan pendidikan kita belum pernah membicarakan hal ini karena kita rata-rata *given*. Mungkin ini sudah momennya, saatnya kita bersuara terus ya. Termasuk juga para akademisi DPR agar nanti di dalam masa transisi pemerintahan baru dalam penganggaran 20% tadi, benar-benar terlihat spesifik. Kalau saya targetnya, sebetulnya bukan pingin mengambil semua kewenangan yang ada di daerah

maupun di K/L lain. Tapi kira-kira dari 20% yang ada Kemendikbud itu berapa sih yang bisa dikelola?

Ini mungkin Pak Fasli tahu kan saat ini kan baru 13 14 15%, *nah* optimalnya kira-kira berapa persen sih? Kalau kita pengennya misalnya 50% mestinya dari 20% itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan, *nah* tapi kira-kira logika optimalnya seperti apa? Itu pertanyaan saya mudah-mudahan bisa dijawab.

Terima kasih.

Saya berikan kesempatan. Silakan dari narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan semua.

Mas Didik.

REKTOR UNIVERSITAS PARAMADINA, (PROF. DIDIK J. RACHBINI, M.SC., PH.D.):

Baik.

Terima kasih Bapak Ibu sekalian.

Saya juga yang sudah lama meninggalkan bidang pendidikan secara *policy* ya juga mendapat masukan banyak ya. Saya tidak menjawab, tetapi memberikan tambahan saja ya. Hal-hal yang penting untuk Panja ya. Kan kita tahu bahwa ilmu itu induknya amal, kalau ilmunya salah amalnya programnya *policy*-nya ya salah. Ilmunya benar programnya salah juga. *Nah* jadi ada dua mesin yang harus dipakai dan dicantumkan secara jelas di dalam program kebijakan politik peta jalan pendidikan.

Yang pertama adalah *domain* publik. Ini. Yang kedua *domain private*. Sebagai contoh saya di kampung, itu saudara-saudara saya yang tidak mampu pun kalau untuk sekolah ke Malang itu, sapi, kambing dijual untuk, untuk investasi itu orang tidak mampu, apalagi kita. Orang tua saya mengirim saya ke Bogor, saya mengirimkan anak saya ke luar negeri yang lebih maju. Itu otomatis berjalan ya. Jadi *domain* publik, *domain private* ini harus diberi kesempatan. Kami di swasta di *domain private*, harus diberi kesempatan.

Saya curhat tadi kepada pimpinan dan anggota terhormat di sini termasuk Adinda saya, Dewi Coryati yang suaranya cukup bagus ya, dapilnya aman. Itu jangan ditutup, jangan dirusak oleh sesuatu yang tidak adil ya. Kan seperti, saya sebut aja langsung ya UI, UGM, Unpad, Undip, Brawijaya berlomba-lomba masuk, apa mengambil sebanyak-banyak. Waktu diputuskan rasio dosen mahasiswa di Undip masih ada satu dua ratus, 1250 rasionya, tapi dia cepat menggaruk ke sana kemari sehingga rasio. *Nah* itu kan merusak pencatutan secara tidak adil.

Nah sehingga dengan demikian menurut saya *domain* contoh sederhana saja jalan tol dengan jalan ini, tol itu semi *private*, semi publik. Kan walaupun saya tidak dapat ke tol, saya tidak dapat ke swasta, tapi kan saya dapat gratis di mana di jalan biasa saya dapat gratis. Jadi tidak boleh ada yang apa namanya yang tidak, sekarang *problem*-nya itu di publik ya, Pak Dede Yusuf ya.

Yang terhormat Pimpinan,

Problemnya itu di-*domain* publik *domain private* itu sudah menemukan secara sendirinya sekarang wilayah-wilayah IT, psikologi ya *marketing communication* itu di direbut satu kursi ya. Di UIN saja satu kursi direbut oleh 40 orang, jadi mereka menemukan caranya sendiri ya. Saya ekonom, anak saya saya latih supaya dia tahu, *nggak* ada dia pergi ke IT semua dan sudah tidak ada di Indonesia dia pergi sendiri. Jadi dia menemukan problemnya di publik.

Nah di publik begini, saya cerita sejarah 20% kan saya ikut terlibat. Di hulu sudah terjadi tetapi begitu ke luar alirannya sudah macam-macam. Untuk mengumpulkan lagi kekuatan politik 50 anggota dewan di sini *nggak* akan mampu, mengambil seluruh 20% itu walaupun sudah ada perintah Undang-Undang Dasar, tidak seperti BPJS, BPJS kan cuma satu. Tapi ini kan banyak sekali. Sehingga dalam pandangan saya, seperti Pak Dede Yusuf tadi yang sampaikan mulai dari pinggir, kalau bubur panas di pinggir contohnya kan yang saya sampaikan tadi. Pendidikan kedinasan yang ditambah-tambah jadi di luar kedinasan itu dipansuskan. Jadi tidak banyak, mungkin mulai dari 2 atau 3, 2 atau 3 departemen, ngapain *you* Kementerian Keuangan ngurusin sekolah?

Nah udah mulai dua atau tiga masuk ya sudah jalan nanti yang lain ikut sebab kalau mulai dari itu luar habis *nggak*, *nggak* akan kuat kita ya. Jadi ya kalau saya, untuk tambahan dari Panja ini, ya dua wilayah *domain* publik dan privat ini sudah berjalan dan nanti ketika kelas menengah besar, akan jauh lebih banyak investasi di privat daripada di publik yang sekarang ini ya, karena ini kan dari pajak ya, jadi saya tidak tidak membahas keseluruhan.

Tambahan saya itu saja dan kita mensyukuri Bapak Ibu sekalian, waktu kita merdeka literasi itu di konstituante berdebatnya 5% Pak Dede, hanya 5% orang yang melek huruf waktu kita merdeka. Rektor saya, Prof. Harun Zein tahun 48, hanya ada satu SMA di Jawa Timur, di provinsi saya. *Nah* sekarang sudah 97% ya, jadi *nggak* boleh lagi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, nanti pasal-pasalnya hilang semua ya.

Nah mengenai yang detail-detail seperti dampak ekonomi terhadap dampak pendidikan terhadap ekonomi itu nanti sifatnya mikro ya Pak Ferdi ya, sahabat saya yang sudah enam kali aman di dapil. Itu apa namanya studi saja, sebab dampak pendidikan itu tidak langsung, ada yang langsung sedikit. Yang tidak langsung itu ya macam-macam ya apa namanya, *earning* masyarakat, kemudian *development* indeksnya naik dan seterusnya. Dan untuk apa namanya, yang 98 triliun itu fokus untuk apa. Mungkin saya kritik saja, saya

punya anak asuh ya dapat beasiswa di Belanda dan juga ada teman di Jepang dikelola oleh dinas pendidikan tinggi. Mati anak, meninggal, karena beasiswa yang dia keluar itu sedikit tapi terbengkalai ya *nggak*.

Jadi di dalam Kemendiknas sendiri harus ada *effort*. Saya setuju bahwa tidak hanya eksternal tapi yang internal juga Pak Ferdi sarankan itu dilakukan ya. Saya kira itu dari saya, tidak sebagian saja.

Terima kasih karena waktu.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pak Nanang masukkan Pak Nanang.

GURU BESAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UPI (Prof. Dr.H. NANANG FATAH, M.Pd.):

Terima kasih ya.

Saya terpaksa harus menjawab sih, soal ada pertanyaan yang yang bagus ya, mengenai apa yang harus sangat diprioritaskan ya dengan kondisi seperti ini ya.

Pertama, memang betul bahwa kuncinya itu PC, *leader*, itu harus menudukkan seperti tadi, bahwa pendidikan itu itu prioritas yang sangat tinggi itu. Ya seperti George Bush Senior itu, itu Presiden yang suka jalan-jalan ke kelas. Jadi di dewan itu, dia rapat, menginstruksikan meminta mohon agar anggaran dewan itu prioritas pertama harus *learning needs*, di kelas coba. Itu Bush, Bush senior tuh. Pada tahun 2000 waktu itu memang terpuruk Amerika ya dan ini bibit langsung lahirnya justru teori ekonomi pendidikan Johan G. T. Theor Syus itu mulanya dari situ pentingnya tentang *human capital* dikembangkan dan itu kuncinya pada kualitas pembelajaran di kelas.

Jadi itu pemenuhan tentang kebutuhan-kebutuhan alat pelajaran, alat-alat praktik ya, kesejahteraan guru yang tadi disebut *direct cost* namanya itu. *Direct cost* itu yang prioritas tinggi, yang lain itu tidak akan menjadi prioritas tinggi. Jadi kalau dalam teori *network planning* itu jalur bukan jalur kritis gitu ya. Jadi ada jalur kritis, ada jalur yang tidak kritis. *Nah* jalur kritis itu kebutuhan-kebutuhan yang *direct*, yang menyentuh kepada peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Apa saja? *Nah* itu harus diadakan penelitian dan dikaji.

Sebetulnya ya dan itu yang menjadikan pemicu mutu sebetulnya nantinya, tapi kalau itu tidak bisa memilah mana yang kritis mana yang tidak kritis mana yang *urgent* dan tidak *urgent*, itu susah. Tetap itu biaya akan ke mana saja, tidak fokus nanti gitu. Jadi, itu harus melakukan suatu riset kajian ya seperti halnya untuk desentral pendidikan. Itu Amerika itu bertahun-tahun melakukan kebijakan *descentralize of education* itu tidak langsung begitu.

Jalan-jalan ke Amerika kita langsung aja di *school business management* kan gitu, *nggak*. Jadi dilihat kondisi daerah mana yang yang bisa yang bisa melakukan mandiri ya.

Sama PTNBH juga kondisi mana yang bisa mandiri yang betul-betul dia sebagai *corporate university, corporate university*, itu harus ya jiwanya. Karena bisnis, definisi pendidikan apa, usaha sadarnya bisnis usaha, usaha namanya juga, iya, Padang, orang Padang. Jadi yang namanya pendidikan tuh bisnis, artinya dikelola secara prinsip-prinsip bisnis. Kemandirian, mutu, ya itu ya fokus pada *customer*, di sini *customer* fokus, itu fokus pada kebutuhan siswa gitu, bukan tidak kalau kebutuhan siswa jadi fokus *insyaallah* itu, itu satu.

Yang kedua pemicu biaya tinggi memang *kan* ada *domain knowledge*, ada *domain attitude*, ada *domain* keterampilan ya, psikomotor. Untuk *domain* yang psikomotor keterampilan *nggak* bisa digratiskan, *nggak* bisa. Itu membutuhkan kelayakan, kelayakan mutu sarana bahkan harus standar. Kalau tidak standar tidak akan tercapai itu standar, standar keterampilan.

Mengapa, mengapa misalnya biaya UIN termurah? Karena di sana program studi keterampilannya kedokteran rendah, kebanyakan *kan* itu adab, ilmu humaniora, sosial, itu tidak begitu banyak keperluan untuk praktek. Tapi yang namanya menuntut saintek, penguasaan saintek itu tidak bisa kompromi dimurahkannya itu harus standar, standar mutu dan itu biaya ya lah ya, mutual lah ya. Tidak ada mutu, tidak ada biaya itu. Jadi itu, mutu atau mati itu aja. Jadi harus lihat perguruan tinggi mana yang fokusnya ke pengembangan saintek, perguruan mana yang fokus yang pada ilmu-ilmu humaniora. Jadi ada klasifikasi tentang itu rumpun-rumpun ilmu yang dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi, gitu. Dan sama prodi juga bidang-bidang studi gitu, ya.

Nah jadi sama *grand design* pengembangan Dikti itu tidak bisa dibuat sekejap mata atau beberapa hari beberapa minggu beberapa bulan, *nggak* bisa, itu butuh riset, *based on* riset. Jadi suatu kebijakan makro itu harus *based on* riset, harus berdasar riset yang benar. Riset yang layak riset yang benar bukan riset-risetan gitu ya Baru itu bisa kuat. Kalau itu, kalau kebijakan, misalnya ini UKT digoncang sedikit ya lepas ya, karena tidak berbasis riset, tidak berdasar kajian, misalkan BOPTN.

Saya tanya waktu itu Bappenas, waktu sebelum Ibu itu apa itu, Armida sebelum Armida kawan saya di BSNP dulu saya tanya membagi BOS kayak apa formulanya, *nggak* jelas, bagi rata seperti membagi, *nggak* jelas formulanya BOS yang oleh Bappenas dibagikan ya. Itu harus ada formulanya. Formula yang berdasarkan ada tingkat prestasi, misalnya berapa, formula yang keadilan, dilihat dari indikator ekonomi lemah gitu, formula berapa dibobot waktu itu harus ada formula gitu. Bukan bagi duit, bagi aja sekolah atau bagi siswa, tidak jadi ada kriteria-kriteria dari dibobot. Jadi sama dengan pengambilan kebijakan itu, ada bobot-bobot prioritasnya gitu. Itu harus dilakukan.

Nah yang terakhir ini penting, Presiden Bank Dunia waktu itu, McNamara itu, waktu berkunjung ke Indonesia itu dia pidato, kalau Indonesia perjuang tinggi ingin maju itu dia harus melakukan namanya PPBS (Planning, Programming, Budgeting, System). Jadi satu sistem. Jadi kalau kalau pendidikan tidak satu sistem dengan anggaran, dengan keuangan, misalnya standar biaya umum diberlakukan untuk pmda disamakan dengan pendidikan, *nggak* bisa.

Jadi yang tahu tentang standar, misalnya alat-alat praktek, alat-alat praktikum, itu hanya guru dan itu tidak ada pasaran. *Nggak* bisa pakai standar biaya umum seperti untuk departemen yang bukan pendidikan dan tidak bisa kalau bukan, bukan ahli yang membuat suatu program pengembangan dan juga *budget*-nya gitu.

Ini yang mensyaratkan itu presiden Bank Dunia McNamara pada tahun 2000 berkunjung Indonesia. Jadi sekarang itu di Indonesia tinggal menuai badai aja. Kalau Malaysia sekarang menuai hasil panen. Malaysia tahun 74 sampai sekarang kurikulumnya itu kurikulum yang saya rancang sama-sama Pak Fasli ingat kurikulum 74 Pak, itu diambil begitu aja, tapi persyaratannya dipenuhi secara konsisten. Kurikulum 74 itu dari Indonesia diambil *caplak* diterapkan di Malaysia ya. Tapi persyaratannya, gurunya, alat-alatnya, woh itu dipenuhi konsisten dan dia hebat pendidikan.

Jadi kita gonta ganti kurikulum, proyek kurikulum persyaratan persyaratan harus dipenuhi, pemenuhan-pemenuhan *nggak* jelas, ada kuisinya kecukupan-kecukupannya tidak dipenuhi persyaratannya. Jadi tinggal gonta ganti *aja* kurikulum namanya, tidak bisa menghasilkan perubahan, jadilah proyek kurikulum gitu. Jadi ini kritik saya terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di negara kita dibanding. Coba bayangkan tahun 2000 itu saya rapat dengan tiga negara Brunei, Malaysia saya dari Indonesia waktu itu. Waktu S1, S2 misalnya Diknas ngajar di SMA harus S1, S1 harus S2, S2 harus S3.

Waktu itu saya tanya kalau Malaysia gimana? Kami *nggak* menggunakan tentang kualifikasi itu, kami kompetensi. Jadi D3 aja boleh ngajar di SMA tapi gajinya D3 aja sudah 10 juta waktu itu. Saya waktu itu sudah Profesor tahun 2000, 3 juta, jauh sekali coba. Jadi dia prioritas pada kesejahteraan guru selain kompetensi dipenuhi, betul-betul penuh dan alat-alatnya.

Jadi ini Pak yang yang saya ingin tekankan, jadi konsekuensi dari suatu kurikulum, konsekuensi dari mana yang tadi yang *urgent* itu apa. Kalau yang *urgent* itu, guru yang *urgent* itu. Misalnya pendidikan dasar ya atau pendidikan penguasaan saintek, itu harus jelas mana yang *urgent*-nya itu. Jadi kalau dalam Renstra itu mana yang tiap tahun harus terus ada gitu. Itu harus terus ada proyeknya, mana yang hanya satu tahun, mana hanya tahun kedua saja, mana hanya di tahun kelima saja gitu, selesai gitu ya. Itu, itu Renstra dibuat tidak semua itu ada kegiatan di setiap tahun gitu atau semua program gitu. Ini ilmu tentang rencana pengembangan.

Ini McNamara yang, yang mengesankan ke Indonesia pada waktu itu ya. *Nah* Indonesia lemah. *Leader* kita itu, lemah pimpinan pimpinan kita lemah di dalam membuat perencanaan program pengembangan ya, sehingga *roadmap*-nya diminta susah ya.

Sekian saya kira itu komentar saya. Yang lainnya masukan-masukan yang sangat bagus ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Terima kasih.

Pak Fasli.

REKTOR UNIVERSITAS YARSI (PROF. DR. FASLI JALAL, Ph.D.):

Iya terima kasih Pak Ketua.

Artinya kalau kita apakan, *what next steps* ya, jadi menurut saya pertama kalau kita sepakat bahwa *learning outcome* itu adalah tumpuan dan saya kira semua sekolah juga sadar ini, pemda juga, user juga ya dunia usaha, dia sangat mengharapkan hasil belajar yang baik ya. Nanti mana yang karakter ya mana yang *sosial question*-nya dan seterusnya, tapi yang, yang juga yang kontennya ini juga sejalan bersamaan.

Nah karena itu, saya pikir intinya sekarang guru ya. Kita memang kayak berputar-putar aja, guru nih *nggak* pernah tuntas benar mau apa. Contoh sederhana, waktu Undang-Undang Guru dan Dosen. Saya Ketua Panja pemerintahnya, beliau di dengan teman-teman, Pak Irwan dan seterusnya.

Waktu itu kita sudah membayangkan bagaimana agar guru itu lebih sejahtera, sehingga peminat dari lulusan SMA yang terbaik masuk, kesejahteraannya memadai dan kemudian dia punya empat kompetensi itu. Dan, dan waktu itu tidak langsung lulus dia jadi guru, tapi ada orientasi 1 tahun penuh. Dan ini tidak hanya sekedar apa jabatan aja kan, ada juga apa namanya Prajab itu yang ya apapun, kadang-kadang tetap semua lulus. Tapi kalau untuk masa orientasi guru ya, *induction* itu. Itu sebetulnya 1 tahun tuh dia diamati oleh guru senior, diamati oleh orang tua, diamati oleh *peer*-nya, diamati oleh kepala sekolah dan pengawas. Dan rekomendasi mereka ini anak muda ini udah pantas jadi guru atau perlu ditambah, atau memang *nggak* mungkin dia harus dipindahkan ke tempat lain ke perpustakaan, tapi tetap dalam dunia pendidikan. Sekarang *nggak* jelas gitu, gimana caranya *induction* ini menjadi hal pertama, terlepas dari lulusan guru.

Saya sebenarnya sangat ingin kalau bisa Komisi X saya mau nanti apa detailnya. Bagaimana ya, karena pertama misalnya kita mau mengganti guru pensiun itu kan cuma 50, 60.000 per tahun. Bukan jumlah yang dahsyat dan

kita tahu siapa yang akan pensiun, apa mata pelajaran, di mana. Kan kita kan harus bisa menyiapkan kalau perlu setahun sebelum itu sudah disiapkan, bagaimana cara rekrutmennya, bagaimana cara *induction*-nya, sehingga pada saat nanti pensiun guru yang ada itu orangnya sudah ada diganti. Jadi *nggak* ribut lagi dengan guru-guru kontrak, guru honor yang kadang-kadang menjadi alat untuk apa namanya digunakan untuk dititip-titipkan secara politik gitu ya. Akhirnya bertebaranlah guru-guru honor ini padahal Undang-Undang Guru dan Dosen hanya mengatakan 10 tahun sesudah undang-undang disahkan, tidak boleh lagi ada guru-guru honor atau guru-guru kontrak. Semua melalui prosedur, dimana ada guru S1, tambah pendidikan profesi, direkrut dengan seleksi yang ketat, diberi *induction* untuk dicoba dan baru disambut dengan gaji dan tunjangan profesi itu.

Saya melihat PR kita kalau bisa guru yang baru nih Pak Dede ya dan Pak Fikri, kalau bisa memang inilah mata air-mata air kecil yang menyirami sungai yang sudah *polluted* ini, tapi terus menerus. *Nah* kalau 50.000 60.000 setahun kita dapatkan *champion-champion* ini Pak, dalam 5 tahun kita sudah punya 250.000. Lebih dahsyat dari guru penggerak sebenarnya kalau kita siapkan. Dan itu kita tidak menambah proyek, kita tidak bermain di proyek, paling-paling mau *ndak* pemerintah membiayai proses pendidikan profesi dari 50.000 sampai 60.000 itu? Apa perlu *boarding* atau tidak, nanti secara ini di apa, tapi artinya mereka direkrut dengan sungguh-sungguh dari 250.000 lulusan LPTK seperti sekarang. Dari 250.000 lulusan LPTK yang kita perlukan di pemerintah hanya 50.000, 60.000 paling tinggi.

Jadi kalau yang terbaik dari 250.000 ini kita seleksi, kita antar dia dengan pendidikan profesi di LPTK yang terpilih yang memang betul-betul bermutu, karena ini harus batu jajar Kopasus nih kan. Sambut dia dengan baik dan dengan gaji dan penempatan yang jelas dan tidak perlu ribut nasional guru honor tiap tahun, saya lihat.

Waduh, saya dulu waktu pertama jadi Dirjan PMPTK tugas pertama waktu itu, diperintahkan mengamankan 200 366.000 guru kontrak. Waktu itu yang sudah dijanjikan presiden mau dijadikan PNS, *masyaallah*, bukan main nampaknya.

Apalagi sekarang saya dengar sudah lebih dari 1 juta guru kontrak, padahal dulu dengan undang-undang apa, Undang Undang Guru dan Dosen tidak boleh Pemda mengangkat guru kontrak. Tidak boleh APBN dan APBD dipakai untuk guru kontrak, tapi kita melalaikan, akhirnya berlimpah-limpah. Sekarang kayak telur dengan ayam ini. Kalau kita bicara mutu padahal mereka sudah banyak dalam sistem, sudah lama, tapi kalau kita lihat proses rekrutmennya, sebagian mungkin tidak pantas untuk mendidik anak-anak kita, 40 tahun berikutnya ya. Berapa lama dia akan menentukan masa depan?

Jadi karena itu, saya berharap nanti kita fokuskan dengan guru. Bagaimana cara guru mulai dari hulu sejak calon mahasiswa LPTK, kriterianya harus berbeda dengan penerima mahasiswa biasa. Proses 4 tahunnya, proses pendidikan profesinya, proses *induction*-nya dan kemudian proses *continuing*

professional development. Yang saat ini kalau kita lihat guru-guru penggerak saya lihat yang muda-muda itu sudah bagus, cuman waktu dia mengimbaskan, menggerakkan guru-guru lain di sekolahnya, ini hambatan psikologis. Saya lihat ini guru-guru senior yang tidak masuk ke dalam guru penggerak, harusnya guru-guru senior ini harus diundang dan diberi kemudahan untuk menjadi bagian dari guru penggerak. Karena pintu masuk guru penggerak kan teknologi banyak komputer dari awal, jadi yang muda-muda masuk bersaing di sana, yang tua-tua tertinggal. Padahal ini yang calon yang sudah wakil kepala sekolah yang sudah menyiapkan *roadmap* untuk kepala sekolah di oleh daerah tersingkir sekarang, karena adanya keputusan baru yang menjadi kepala sekolah adalah guru penggerak, yang masih muda-muda ini. Memang dia punya kompetensi tapi kalau tidak ditandemkan dengan yang senior itu *nggak* akan jalan.

Jadi saran saya, saya siap nanti kalau mau kita bahas mengenai guru ini nanti dari guru ini baru manajemen sekolah seperti apa yang tadi, baru peran BOS. Sebetulnya kalau BOS ini bisa agak banyak, kita bisa hitung berapa kebutuhan BOS, kebutuhan dasar, kebutuhan khusus karena daerah terpencil, tertinggal atau jumlah muridnya kecil. Kemudian BOS yang untuk inovasi, kreativitas dan bagaimana dia untuk kalau deltanya terlalu berat, walaupun dia apa, sedikit muridnya, tapi tidak cukup dengan BOS dua lapis tadi, ini perlu lagi tambahan BOS penguatan. *Nah* kalau guru kita ini kan, kemudian manajemen sekolah kita benahi BOS, kita hitung Pak. Ini saja kalau bisa kita arahkan dari uang yang ada, apalagi kalau yang 100 triliun tadi bisa kita ambil 50 triliun aja, 50 triliun aja Pak Ferdi, dah 100 triliun itu misalnya untuk tahun 2025 ini.

Saya kira agenda-agenda misalnya Kedaireka yang bagus di Dikti kemudian juga apa, kompetensi untuk meningkatkan mutu dari program-program. Beberapa hal itu saya lihat sudah bagus tapi mulanya dijanjikan 1 triliun dananya, eh menciut tinggal sekarang 250.000, 250 miliar padahal perguruan tinggi sudah bergerak banyak, negeri dan swasta. Karena di sana saya lihat keadilan juga ada ya, karena siapa yang mampu, tapi juga ada *tear* di mana yang kurang berkembang, ada pembimbingan yang maju-maju. Silakan bersaing secara bebas.

Jadi itu harapan saya kita, mulai dari *learning outcome* kita petakan benar. Kita dudukkan posisi guru dari hulu ke hilir. Peran dari kepengawasan kita lihat dan juga balai-balai, balai-balai milik pemerintah pusat Pak Dede. Yang sebetulnya dia bisa menjadi jembatan terus menerus untuk memastikan daerah melakukan tugasnya terutama dalam mengejar mutu. Ini kan kayak FBI, ini harusnya jadi kan polisi-polisi lokal sudah ada nih, otonomi. Tapi FBI kita *nggak* ada yang datang. Kalau ada masalah dia pergi ke sana sendiri atau satu tim, sekian lama selesai, dia kembalikan ke *local police* lagi. *Nah* balai-balai kita ini kalau kita isi dengan baik, kawinkan dengan pendidikan tinggi dengan pakar-pakar pendidikan tinggi dan juga dari berbagai lembaga LSM yang apa, saya kira ini akan menjadi *federal-federal office*.

Nah kita hitung biayanya Pak Johar berapa tugas mereka, berapa biaya untuk mereka terus-menerus membina kabupaten/kota dan membina provinsi, sehingga mereka tidak lari lagi dari tujuan hasil *learning outcome* adalah tanggung jawab mereka. Dan data data kita sudah punya cara kita sudah punya untuk mengetahui apakah ada *progress* atau tidak setiap tahun dari berbagai sekolah, malahan prestasi guru pun bisa diketahui. Jadi sudah cukup canggih di situnya, tapi tidak dipakai.

Jadi analisa dari hasil tes tadi itu tidak dipakai secara sungguh-sungguh oleh daerah untuk menentukan guru mana akan dapat pelatihan apa, apa dipindah, apa *team teaching* dilakukan dan seterusnya. Kalau ini kita lakukan, saya kira kita mulai dari bawah, nanti kita akan angkat berapa sebetulnya kebutuhan total itu. Kalau untuk Dikti, saya kira menu-menu yang sudah ada sudah cukup banyak, cuma uangnya aja yang kurang. Dikti ini mau ditambah 2-3 kali lipat saya katakan tadi, 100 triliun kalau mau ditanya itu minimal 100 triliun untuk Dikti ya, ya dan itu juga 1 hanya 1% dari total GDP kita dan *benchmark*, semua dunia sekarang menuju ke arah sana.

Jadi mohon maaf apa saya tahu bahwa Pak Fikri minta lebih ini, tapi saya mikir juga apakah perlu misalnya Komisi X bertemu dengan apakah forum rektor, apakah asosiasi LPTK? Tapi kasih mereka pertanyaan-pertanyaan yang tajam dulu. Suruh mereka membuat analisa dulu, jangan *brainstorming* lagi di sini. Kirim dulu ke ke sini, baru nanti waktu digunakan untuk yang penting-penting aja. Tapi di tim apa, di tim Komisi X harus ada tenaga teknis ya. Ini staf ahli kan ada. Ini mungkin kita bisa memperkuat nanti untuk mempertajam di sudah-sudah apa ini, forum-forum ini. Ini langsung dinarasikan langsung dipertajam mengarah kepada butir-butir yang paling diperlukan sebagai apa, *core* daripada rekomendasi dari Panja ini. Saya siaplah dan saya kira banyak orang siap ini Pak, tinggal lagi *call* dari Komisi X *aja*.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Pak Dede jangan-jangan Pak Fasli, sama Pak Nanang, sama Pak Didi ini siap membantu kita buat peta jalan.

KETUA RAPAT:

Oh iya?

F-GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Iya dengan Komisi X bikin peta jalan pendidikan bukan, bukan Kemendikbud.

KETUA RAPAT:

Iya jadi ya ada cerita, dulu Kemdikbud mau minta revisi Sisdiknas, kami ngotot peta jalannya dulu bikin, tanpa peta jalan kita *blank* mau ke mana. Tapi apa yang disampaikan Fasli tadi, saya pikir emang Kemendikbud ini butuh Wamen lagi kayaknya ya. Artinya *nggak*, maksudnya mau tidak mau, kita butuh masukan-masukan yang memahami. Ya ini buat berikutnya lah Pak ya. Buat nanti ini kan penguasa berikutnya nih, Gerindra nih.

Terima kasih Pak Fasli, Pak Didi dan juga Pak Nanang saya pikir terima kasih banyak. *Nggak* usah pakai bacaan kesimpulan lah ya. Cukuplah ya sudah mantap semua ini ya. Kita langsung kita undang makan siang saja.

Atas nama Komisi X, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Fasli, Pak Didi dan juga Pak Nanang. Iya, pasti kita akan undang dan apa saya tertarik tadi forum Rektor, LPTK, mungkin kita masukkan nanti.

Baik teman-teman, cukup demikian ya? Baik, *hatur nuhun*. Atas segala masukan-masukan yang luar biasa dengan baca hamdalah kita tutup rapat panja ini.

*Alhamdulillahirabbilalamin,
Bilillahitaufiq wal hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 12.00 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

**DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003**